

Fikarwin Zuska, dkk

ASPEK KULTURAL PEMEKARAN DAERAH DI SUMATERA UTARA



Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

**ASPEK KULTURAL PEMEKARAN DAERAH DI
SUMATERA UTARA**

**Ketua Peneliti:
Dr. Fikarwin Zuska**

**Anggota:
Drs. Gustanto, M. Hum
Drs. Agustrisno, MSP
Drs. Hendra Mulia**

**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh
2012**

Hak Cipta 2012 pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan foto copy, tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan pertama, 2012

Penulis :

Fikarwin Zuska, dkk

Aspek Kultural Pemekaran Daerah di Sumatera Utara

ISBN: 978-602-9457-02-5

Setting/layout : Muhammad Faiz Basyamfar

Desain Sampul : Muhammad Faiz Basyamfar

Penerbit ■ Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Jln. TWK. Hasyim Banta Muda 17 Banda Aceh

Telepon: 0651 23226-24216

Fax: 0651 23226

Email: bpsnt.nad@budpar.go.id

SAMBUTAN
KEPALA BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BANDA ACEH

Diakui atau tidak diakui, pemekaran daerah merupakan dampak langsung penerapan Undang-undang Otonomi Daerah. Maraknya pemekaran termasuk permintaan pemekaran daerah mulai dinilai memprihatinkan karena ada pergeseran motivasi yang ternyata memantik munculnya masalah lain dalam proses pemekaran daerah di Indonesia.

Pemekaran bukan hal baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Jejaknya termaktub dalam sederet undang-undang. Namun gejala sosial yang mengikuti pemekaran daerah masa kini, seperti pemaksaan kehendak yang mencetuskan konflik horizontal pasti bukan bagian dari kebiasaan masyarakat kita. Di sinilah pergeseran itu berlangsung.

Penerbitan buku ini lebih dimaksudkan sebagai pilihan dalam mempertimbangkan pemekaran atau menata daerah pemekaran. Ada aspek kebudayaan yang kerap diabaikan padahal aspek inilah yang selalu menyelamatkan kehidupan masyarakat. Jika demikian bukan mustahil cita-cita menjadi negara kesejahteraan umum dapat dicapai.

Semoga buku ini dapat menginspirasi sekaligus memberikan gambaran tentang bagaimana pemanfaatan aspek-aspek kultural dan nilai yang dikandungnya dalam rencana pemekaran dan penataan daerah pemekaran. Tidak dapat dipungkiri, aspek-aspek yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat kerap menjadi solusi dalam penyelesaian masalah-masalah sosial dalam masyarakat itu sendiri.



Banda Aceh, Desember 2012
Kepala BPSNT Banda Aceh

Djuniat S. Sos.
NIP. 19570307197903101

KATA PENGANTAR

Sejak UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah diberlakukan perhatian masyarakat kita tertumpu pada jumlah daerah yang dimekarkan serta dampak yang timbul akibat pemekaran. Namun seringkali perhatian kita atau masyarakat tersita pada berita yang menunjukkan gejala sosial akibat adanya pemaksaan kehendak segelintir orang agar daerahnya dimekarkan atau dampak dari pemekaran daerah.

Kasus terbunuhnya Abdul Aziz Angkat, Ketua DPRD Sumatera Utara oleh massa yang menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli atau penutupan akses jalan oleh warga daerah pemekaran agar warga daerah induk tidak melintas di Sulawesi Selatan merupakan dua contoh bagaimana pemekaran daerah itu menimbulkan masalah akibat politisasi dan lemahnya sosialisasi mengenai pemekaran

Kecenderungan pemekaran yang dipaksakan atau dimotivasi oleh keinginan segelintir elite daerah telah mendorong pemerintah menetapkan moratorium. Sayangnya, moratorium dan amandemen Undang-undang Otonomi Daerah tidak dapat meredam 'keinginan' masyarakat untuk membentuk daerah baru yang secara simbolik merepresentasikan diri mereka sendiri.

Namun simbolisasi itu seringkali tidak mempertimbangkan aspek-aspek kultural yang sesungguhnya telah menjadi identitas, perekat sosial, wadah berhimpun untuk mencapai konsensus. Oleh karena itu, kami berusaha menggambarkan dan menawarkan model pemanfaatan aspek-aspek kultural dalam pemekaran atau penataan daerah pemekaran. Gambaran dan pemanfaatan aspek-aspek kultural diyakini dapat memecahkan masalah-masalah yang mulai menggejala sebagai patologi sosial di masa kini. Semoga bermanfaat.

Banda Aceh, Desember 2012
Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang	1
II. Etnisitas, Politik Etnisitas, dan Pemekaran.....	8
III. Masalah dan Lingkup Penelitian.....	18
IV. Tujuan Penelitian.....	19
V. Lokasi Penelitian	19
VI. Metode Penelitian.....	19
BAB II. ASAHAN DAN BATUBARA	21
I. Lokasi dan Penghuninya	21
II. Sejarah Politik.....	28
BAB III. PEMBENTUKAN KABUPATEN BATUBARA.....	39
I. Proses Pembentukan Kabupaten Batubara.....	39
II. Respons Para Stakeholder	52
BAB IV. ASPEK KULTURAL PEMEKARAN ASAHAN DAN PEMBENTUKAN KABUPATEN BATUBARA	58
I. Primordialisme	59
II. Mitologi Asal-Usul.....	65
III. Negara dan Politik Etnik	76
IV. Money Politics dan Kekerasan	82
BAB V. PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I PENDAHULUAN

I. Latarbelakang

Sudah banyak daerah di Indonesia, terutama Kabupaten, mengalami pemekaran sejak tahun 1999. Satu kabupaten dapat dipecah (difragmentasi) menjadi dua, tiga atau bahkan empat kabupaten atau kota yang baru. Contohnya Kabupaten Tapanuli Utara, di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini dipecah atau dimekarkan menjadi Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Samosir. Begitu juga terjadi pada Kabupaten Nias, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ketiga kabupaten 'induk' yang berada di wilayah Sumatera Utara, itu juga melahirkan kabupaten-kabupaten atau kota-kota pemekaran yang baru.

Peristiwa yang sama (fragmentasi kabupaten) terjadi juga pada kabupaten-kabupaten lain di luar Provinsi Sumatera Utara. Menurut Jacqueline Vel (2007), dari telaahnya atas literatur yang ada mengenai desentralisasi di Indonesia bahwa, *".....all cases of pemekaran discussed reveal the strong interests of local elites, who act as initiators of the secession process, head the lobbying committees, and – if successful – occupy the offices of power in the new provinces or districts"*. Tetapi dari hasil penelitiannya sendiri di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), Vel mengatakan demikian:

“The ones active in the campaign on Sumba were actually a small group. Closer analysis suggests that the older participants in the campaign were marginal members of the local elite: with sufficient status in traditional terms to be accepted as a leader, but with positions in government or the private sector that did not satisfy them, or put them outside the decision-making circuit. Leading people in the Central Sumba movement include a village head, a reverend suspended from his church office because of a long history of larger and smaller conflicts, and several retired civil servants. These are supported by a large group of well-educated, unemployed youths, who do not want to work in agriculture. These youths see the new district as an opportunity to get the jobs they hoped and studied for. In the short term the campaigning itself provides them with lots of excitement, which is otherwise hard to get in Sumba. They are very vocal and could become more powerful in their capacity to use violence and enforce social exclusion for political opponents (Vel 2007: 102-103).

Selaras dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebenarnya hampir serupa, yaitu masalah budaya atau sosiokultural terkait pemekaran wilayah administrasi pemerintahan (*administrative fragmentation*) di Sumatera Utara. Pemekaran wilayah administrasi pemerintahan di Sumatera Utara, sama seperti di wilayah provinsi se Indonesia lainnya, banyak terjadi setelah masa pemerintahan Orde Baru berlalu. Setelah masa Orde Baru berakhir proses pemekaran wilayah berjalan amat lancar dan cukup besar frekwensinya. Lancarnya proses pemekaran dan banyaknya kejadian pemekaran tersebut tidak lain karena ‘rintangan-rintangan’ yang dipasang dan

dijaga ketat selama masa otoritarian Orde Baru telah berkurang kekuatannya.

Rintangan-rintangan yang diperhitungkan menghalangi proses pemekaran daerah itu rupanya ikut terlindas ketika arus kencang demokratisasi global (ditandai oleh besarnya tuntutan warga untuk menegakkan demokrasi) berhasil melakukan dua hal yang saling berkaitan di Indonesia: Pertama, arus demokratisasi berhasil memukul runtuh pilar-pilar penyokong Orde Baru (di antaranya konstelasi politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia [ABRI], Birokrasi, Golkar); dan kedua, arus yang sama, menghidupkan kembali sendi-sendi masyarakat Indonesia yang sudah telanjur 'beku' dan 'kaku' selama 32 tahun rejim otoritarian Soeharto (antara lain ditandai oleh munculnya ratusan partai politik di masyarakat). Proses-proses yang dinamakan kemudian dengan istilah reformasi, itulah yang melahirkan kebijakan-kebijakan seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (sebanyak empat kali), Desentralisasi Pemerintahan atau Otonomi Daerah, Pemilihan Umum Langsung, Undang - Undang Anti-Diskriminasi, desakralisasi isu SARA (Suku, Ras dan Antar Golongan), dan lain-lain, termasuk pelaksanaan pemekaran wilayah administrasi pemerintahan yang terjadi di era sekarang (Era Reformasi).

Pemekaran wilayah pemerintahan di Sumatera Utara paska Orde Baru, menurut sebuah catatan (Wikipedia), dimulai dengan lahirnya Kabupaten Mandailing Natal (hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan) dan Kabupaten Toba Samosir (hasil

pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara), masing-masing pada tanggal 23 November 1998; tidak lama setelah Presiden Soeharto mundur (*lengser*) dari jabatannya 21 Mei 1998. Selepas itu, sama seperti di provinsi lain, berlahiran kabupaten-kabupaten dan kota-kota baru lainnya sebagai hasil pemekaran, baik yang mekar dari “kabupaten induk” maupun yang mekar dari kabupaten hasil pemekaran, seperti Kabupaten Toba Samosir dari induk Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir dari ‘induk-muda’ Kabupaten Toba Samosir. Daftar selengkapnya tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1:
**DAFTAR KABUPATEN/KOTA HASIL PEMEKARAN
DI SUMATERA UTARA**

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA HASIL PEMEKARAN	KABUPATEN INDUK	TAHUN PEMBENTUKAN
1.	Kabupaten Mandailing Natal	Tapanuli Selatan	23 November 1998
2.	Kabupaten Toba Samosir	Tapanuli Utara	23 November 1998
3.	Kota Padang Sidempuan	Tapanuli Selatan	21 Juni 2001
4.	Kabupaten Pakpak Bharat	Dairi	25 Februari 2003
5.	Kabupaten Nias Selatan	Nias	25 Februari 2003
6.	Kabupaten Humbang Hasundutan	Tapanuli Utara	25 Februari 2003
7.	Kabupaten Serdang Bedagai	Deli Serdang	18 Desember 2003
8.	Kabupaten Samosir	Toba Samosir	18 Desember 2003
9.	Kabupaten Batubara	Asahan	2 Januari 2007
10.	Kabupaten Padang Lawas	Tapanuli Selatan	17 Juli 2007
11.	Kabupaten Padang Lawas Utara	Tapanuli Selatan	17 Juli 2007
12.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Labuhan Batu	24 Juni 2008
13.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Labuhan Batu	24 Juni 2008
14.	Kota Gunung Sitoli	Nias	29 Oktober 2008
15.	Kabupaten Nias Barat	Nias	29 Oktober 2008
16.	Kabupaten Nias Utara	Nias	29 Oktober 2008

Sumber: Pemekaran Daerah, Wikipedia.

Ada 16 Kabupaten/kota di Sumatera Utara lahir dalam kurun waktu 10 tahun paska Orde Baru. Lahirnya ke-16 kabupaten kota itu membuat jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara kini sebanyak 33 buah, terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota. Sebetulnya, jumlah daerah-daerah otonom itu masih bisa lebih banyak lagi bila kelak wacana yang ada sekarang tentang pemekaran Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kota Medan dan Kabupaten Langkat jadi terealisasi. Kalau wacana itu diperhitungkan maka jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara bisa mungkin mencapai 40 buah atau lebih. Hal ini cukup menakjubkan bila dibandingkan dengan keadaan di Sumatera Utara masa Orde Baru yang selama 32 tahun nyaris tidak mengalami pemekaran dan sama sekali tidak ada tuntutan yang berarti mengenai hal itu. Warganya tenang, seakan-akan tidak memiliki dinamika politik, dibandingkan Aceh tetangga terdekatnya yang terus menggelegak karena sebahagian warganya semenjak pertengahan dasawarsa 70-an (Deklarasi Aceh Merdeka) menuntut untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Sekarang baru diketahui bahwa ternyata dinamika politik warga Sumatera Utara pun cukup tinggi. Selama ini dinamika itu terpendam dan kini, setelah reformasi, warga Sumatera Utara meluapkan energi politiknya yang besar itu melalui jalur politik-hukum formal, pemekaran wilayah.

Dinamika politik pemekaran wilayah di Sumatera Utara, sebagaimana berjalan akhir-akhir ini, ternyata tidak hanya bergerak pada level pembentukan daerah-daerah otonom (kabupaten/kota). Di Sumatera Utara juga ada upaya pembentukan provinsi. Upaya yang sudah dirintis, dan bahkan sudah menelan korban,

meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Abdul Azis Angkat, akibat suatu demonstrasi yang cukup brutal dari massa pendukung pembentukan Propinsi dimaksud (3/2/09) adalah Propinsi Tapanuli (Protap). Menurut amatan pelbagai pihak sementara ini bahwa pembentukan-pembentukan kabupaten/kota (baca: pemekaran) yang cukup berbilang tadi pun sebenarnya justeru (sebagian) akan bermuara atau ada kaitannya dengan cita-cita pembentukan provinsi baru (lepas dari Sumatera Utara)¹.

Suatu provinsi dapat dibentuk atau dimekarkan, antara lain, bila bakal calon provinsi itu sedikitnya didukung oleh 5 kabupaten/kota yang ada. Penggagas Provinsi Tapanuli, misalnya, mereka sudah memperhitungkan hal itu sebelumnya sehingga wilayah Kabupaten Tapanuli Utara pun dibelah-belah lebih dahulu. Mulanya dibelah tiga, lalu ditambah satu lagi menjadi empat kabupaten. Inilah kabupaten-kabupaten yang dipersiapkan dan dipastikan mendukung Protap: (1). Kabupaten Tapanuli Utara, (2). Kabupaten Humbang Hasundutan, (3). Kabupaten Toba Samosir, dan (4). Kabupaten Samosir. Kelompok penggagas Protap berharap Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, bahkan Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat serta Nias akan ikut bergabung di dalamnya. Namun kenyataan tidak demikian. Pemerintahan masing-masing kabupaten yang disebutkan terakhir mempunyai pemikiran lain.

Kabupaten Tapanuli Selatan berikut pecahan-pecahannya Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten

¹ Lihat Zuska & Agustrisno (2010: 73)

Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara dipastikan tidak akan mungkin bergabung dengan Protap karena hubungan kedua puak di wilayah Tapanuli ini, *Par Utara* dan *Par Selatan*, sudah sejak lama berseteru (Harahap 2008). Oleh sebab itu konon gugusan 5 buah kabupaten/kota yang sudah terbentuk di 'kelompok Selatan' ini pun telah bersiap-siap mendirikan provinsi sendiri manakala Propinsi Tapanuli kelak berdiri. Hal serupa dilakukan oleh 'kelompok' Labuhan Batu, meskipun kelompok ini baru menyiapkan 3 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. "Kelompok" Nias juga berkemungkinan sedang melakukan persiapan serupa, mendirikan provinsi tersendiri. Gugusan ini malahan sudah lebih siap karena Kabupaten Nias saat ini telah mekar menjadi 5 Kabupaten/Kota: (1). Kabupaten Nias, (2). Kota Gunung Sitoli, (3). Kabupaten Nias Selatan, (4). Kabupaten Nias Utara dan (5). Kabupaten Nias Barat.

Pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten/Kota maupun wacana atau isu pemekaran Provinsi di Sumatera Utara, seperti terlihat di atas, menggambarkan relasi-relasi etnisitas, dan itu adalah refleksi kultural; menyangkut gagasan, nilai-nilai, pandangan dan atau stereotip antar kelompok-kelompok etnis yang secara historis mengklaim sesuatu wilayah sebagai tanah leluhurnya dan secara demografis kelompok tersebut adalah mayoritas di wilayah bersangkutan, sehingga hal itu ikut terbawa masuk dalam kancah politik-hukum pemekaran wilayah pemerintahan di Sumatera Utara. Penelitian ini berpusat pada isu kultural atau dapat juga dikatakan budaya politik (*political culture*) yang 'bekerja' dalam proses-proses

pemekaran wilayah pemerintahan di Sumatera Utara, khususnya kasus pemekaran Kabupaten Asahan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara yang terealisasi pada tahun 2007.

II. Etnisitas, Politik Etnisitas, dan Pemekaran

Pustaka yang membahas dan menerangkan ekspresi dan refleksi kultural di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam relasi etnisitas (kesukubangsaan), sudah banyak beredar. Dari sana kita dapat belajar bahwa relasi etnisitas itu ternyata bisa dalam keadaan tegang dan dianalogikan seperti “api dalam sekam”: menyala di dalam tetapi tidak kelihatan di permukaan. Di permukaan tenang-tenang saja tetapi sesewaktu api yang ‘ada di dalam’ hubungan itu dapat membesar dan membakar segalanya. Pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan hubungan antar sukubangsa itu ber-api?

Tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Untuk menjawab pertanyaan itu kita memerlukan konsep-konsep dan teori-teori. Sebab itu kita perlu merujuk antara lain Harold R. Isaacs (1993 [1974]) tentang apa yang disebutnya Rumah Muumbi. Istilah ini diambilnya dari suku Kikuyu di Kenya. Orang Kikuyu di Kenya rupanya bersumpah setiap tahun guna meredakan ketegangan antar suku di sana. Dalam sumpahnya mereka berikrar: “Aku tidak akan meninggalkan Rumah Muumbi”. Muumbi, kata Isaacs, adalah

seorang leluhur. Rumahnya merupakan rahim ibu tempat semua orang Kikuyu dikandung dan dilahirkan, dan tempat semua orang Kikuyu dibesarkan. Dengan sumpah itu, terang Isaacs selanjutnya, setiap (orang) dari suku itu menyatakan loyalitas mereka kepada suku, lebih daripada segalanya.

Selanjutnya Isaacs menegaskan bahwa:

“Tidak hanya di Kenya, namun di mana-mana di seluruh bumi ini terdapat Muumbi, nenek moyang yang mengilhami rumah-rumah semacam itu. Masyarakat yang hidup di dalamnya tergabung lebih akrab dan lebih bersatu daripada sebelumnya. Mereka yang pergi ke tempat-tempat yang lain untuk melihat kehidupan lain di dunia ini, akan kembali pulang. Yang lain yang masih mencari tempat lain yang lebih terbuka untuk didiami kemudian menghentikan niatnya, karena tidak yakin ke mana mereka akan pergi. Di mana-mana rumah Muumbi yang mulai runtuh, dipugar kembali atau dibangun rumah-rumah yang baru” (Isaacs 1993: 2).

Intinya adalah bahwa pada diri setiap warga suatu kelompok suku-bangsa (*ethnic group*) ada sesuatu yang membuatnya terikat dan keterikatan terhadap sesuatu itu sepertinya tidak bisa lepas/putus. Ke mana pun seseorang itu pergi, ‘sesuatu’ yang dikatakan dengan Rumah Muumbi tadi, tetap memanggilnya pulang, karena tidak bisa dipungkiri orang itu juga rindu kepadanya. Oleh orang Kikuyu, kata Isaacs, sesuatu yang mengikat, membuat akrab dan membuat rindu macam itu dinamakan Rumah Muumbi.

Gejala macam inilah mungkin yang oleh Clifford Geertz dinamakan primordial atau, lebih tepat lagi *primordial attachments* (ikatan-ikatan primordial); suatu ikatan yang berasal dari “unsur-unsur bawaan” (*givens*) seperti misalnya: hubungan kekerabatan, dan juga keadaan

bawaan karena terlahir dalam komunitas agama tertentu, bertutur dengan bahasa tertentu, dialek bahasa tertentu, bahkan mengikuti praktik-praktik sosial tertentu. Inipun, kata Geertz lebih lanjut, mempunyai kekuatan memaksa yang tak terperikan dan terkadang terlalu kuat: *"These congruities of blood, speech, custom and so on, are seen to have an ineffable, and at times overpowering, coerciveness in and of themselves"* (Geertz 1973: 259).

Geertz mengakui bahwa memang kekuatan dari ikatan-ikatan primordial itu bervariasi keadaannya, seperti berikut:

"The general strength of such primordial bonds, and the types of them that are important, differ from person to person, from society to society, and from time to time. But for virtually every person, in every society, at almost all times, some attachments seem to flow more from a sense of natural —some would say spiritual— affinity than from social interaction".

Artinya adalah bahwa dapat saja pada suatu masyarakat, pada suatu waktu, ikatan-ikatan primordial tidak terlalu kuat 'memanggil' seseorang untuk mewujudkan rumah Muumbi yang dirasa mulai rapuh. Akan tetapi di saat yang lain, panggilan tersebut terasa begitu kuat. Inilah barangkali yang menjadi alasan mengapa pemekaran-pemekaran wilayah pemerintahan akhir-akhir ini bergerak begitu kencang: saatnya Rumah Muumbi memanggil warganya untuk membangun Rumah Mumbi yang 'dianggap' hampir roboh, atau sebaliknya, untuk dengan sengaja membangun dan memperkuat Rumah Muumbi yang sudah ada untuk menancapkan dominasi yang lebih kokoh.

Macam-macam hal dapat memicu 'bergerak atau terusiknya' sentimen-sentimen primordial untuk tujuan yang lebih politis macam itu. Menurut Stanley J. Tambiah (1994: 436) hal itu (baca: *politicization of ethnicity*) terjadi karena pengalaman di negara-negara baru dalam menangani 'orang banyak', itu telah menyebabkan timbulnya kesadaran akan identitas etnis (*conscious of ethnic identity*) yang mana kemudian kesadaran tersebut digerakkan (*energized*) sebagai kolektivitas-kelektivitas untuk dilibatkan dalam tindakan politik. Kesadaran bahwa identitas etnis kolektif itu dapat dimanfaatkan dan dimanipulasi dalam tindakan politik, tambah Tambiah, "itu tentu saja terkait dengan peningkatan kesempatan berkontak yang dikarenakan oleh perbaikan transport; adopsi dan pemanfaatan media modern yang cepat; tingkat pendidikan dan melek huruf yang meningkat serta persebaran luas apa yang dinamakan Benedict Anderson 'print capitalism'".

Penjelasan lain, kata Tambiah, terletak pada perkembangbiakan dan popularisasi teater-teater jalanan dan arena-arena publik; pengumpulan massa dalam jumlah besar secara berkala, mulai dari relli-relli politik, pemilihan umum dan referendum hingga pemogokan, demonstrasi, *sit-ins*, dan protes massa. Kemudian, faktor signifikan lain, ungkap Tambiah, adalah proliferasi sekolah-sekolah, *colleges*, dan universitas-universitas, yang seperti pernah dialami pabrik-pabrik dalam pembangunan industri, hal tersebut menyediakan tempat untuk mobilisasi dan pengumpulan aktivis-aktivis untuk terlibat dalam tindakan politik.

Kaitannya dengan politisasi etnisitas adalah bahwa negara, di mana pun saat ini berada, seperti dikemukakan Glazer & Moynihan (Tambiah 1994: 436), "telah menjadi wasit yang langsung dan krusial mengenai kesejahteraan ekonomi, dan juga mengenai status politik dan apapun yang mengalir dari itu". Di lain pihak negara-negara, baik kapitalis, sosialis maupun negara sedang berkembang yang berkomitmen pada kesejahteraan, menurut Tambiah, memberi secara khusus respon terhadap klaim-klaim etnis. Ada saat-saat yang disediakan bagi anggota-anggota kelompok etnis atau yang sama seperti itu, untuk memobilisasi dan membuat klaim atas nama kelompok, guna mendapatkan keuntungan dari konsesi yang dibuat. Strategi etnisitas membuat klaim atas sumberdaya milik negara inilah, tak bisa dielakkan, kemudian memperkuat dan mempertahankan '*ethnic political machinery*'; sebab dia merupakan penyalur dari tindakan-tindakan afirmatif atau pendistribusian bantuan. Bahkan sesuai pengalaman di India, Sri Lanka dan Malaysia, bahwa tuntutan-tuntutan politik pun dibuat atas dasar afiliasi etnis (Tambiah 1994:437). Oleh sebab itu jikalau ada kelompok-kelompok yang tak beruntung, dalam arti tak merasa adanya 'kesetaraan hasil' (*equality of results*) dari apa yang diberikan/ diperoleh dari apa yang disediakan negara, maka hal itu bisa mendorong kompetisi atau konflik etnik yang lebih terbuka, termasuk pemekaran.

Myrna Eindhoven (2007), dalam kajiannya atas pemekaran Kepulauan Mentawai dari Kabupaten Padang Pariaman, dengan sangat jelas menunjukkan betapa unsur perbedaan atau perselisihan

etnisitas, terutama budaya dan agama, itu bekerja sangat kuat dalam proses pemekaran atau pelepasan Kepulauan Mentawai dari Kabupaten Pariaman. Hal dimaksud terlihat, misalnya, dari pernyataan ini:

“Local elites have been able to take over the political power from the mainland Minangkabau who had been ruling the archipelago for decades. The Mentawaians were euphoric now that they finally saw themselves freed from their ‘colonization’ by the significantly different – in cultural as well as religious senses – mainland Minangkabau”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Orang Mentawai, secara emosional, tidak berterima dengan kehadiran kekuasaan orang Minangkabau memimpin wilayah mereka (Mentawai) yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Bahkan orang Mentawai menganggap Minangkabau yang berbeda secara signifikan dengan mereka —dalam budaya maupun religi— itu sebagai penjajah (*colonializer*) yang harus dienyahkan dari negeri leluhur mereka.

Segi lain yang juga perlu kita perhatikan mengenai kesukuan (etnisitas) ini adalah soal relasi dengan ‘yang lain’ (others). Kajian arkeologis tentang etnisitas pun menunjukkan bahwa etnisitas, sama dengan pandangan zaman sekarang, itu adalah sebuah konstuk yang dibentuk secara subjektif dan dinamik melalui interaksi dengan kelompok etnik lain:

".....ethnicity as a subjective, dynamic construct that is shaped through interaction with an ethnic 'other'..... ethnic identities cannot be studied in isolation from other forms of identity. ethnic identity is often related to questions of power, religion, law, class and gender. Ethnicity may be expressed through language, material culture or social practices" (Ton Derks & Nico Roymans 2009:1).

Oleh sebab itu maka tidak mengherankan kalau kemudian relasi antar etnik tidak hanya menghasilkan konstruk etnisitas, tetapi juga *stereotype*. Berikut kalimat yang kami kutip dari Zhang Jijiao (2009:177).

"Stereotypes are generalizations about a group of people, whereby a defined set of characteristics is attributed to it. The attendant classifications can be positive or negative, such as when various nationalities are classified as friendly or unfriendly (Hilton and Fein 1989). Trans-ethnic communication always begins with certain 'stereotypes'. When people from different ethnicities come into contact with each other for the first time, they usually tend to classify the others in the group to which they belong and to judge their character according to stereotype"

Jijiao menambahkan lagi bahwa stereotip tidak hanya digunakan untuk mengkalsifikasi dan mengadili kelompok lain dengan sesuatu yang positif atau negatif, tetapi juga bekerja saat menentukan kalah menangnya dua kelompok etnik yang berkompetisi atas sesuatu hal.

"Careful analysis suggests that in many cases, we cannot simply say who suffered losses or who gained unfair advantages from the relations between two ethnic groups. Perceptions of loss and unfair gain are often closely related to established stereotypes" (p.178).

Begitulah besarnya peran dari stereotipe dalam relasi antar kelompok etnik. Ia bekerja secara misterius, sekalipun dalam masyarakat tertentu ia diintensifikasi dengan sengaja untuk menciptakan 'out-groups':

Stereotyping can be subconscious, subtly biasing our decisions and actions, even when we do our best not to be biased. In certain societies this is intensified, as the stereotyping of an ethnic group brings its members together and greatly contributes to making other ethnic groups out-groups (p.178).

Konflik etnik tidak mustahil terjadi dalam masyarakat yang multi etnik. Terjadi konflik etnik, menurut Jijiao (2009), adalah karena adanya upaya pengejaran kepentingan dari masing-masing kelompok etnik. Oleh sebab itu kesempatan untuk mengakses sumber daya menjadi sangat penting.

"All ethnic groups are engaged in the pursuit of interest, often appearing to be more efficient in such a pursuit than other groups. An ethnic group can, to a large extent, be defined as an interest group. In the past, some conflicts (such as the Irish divide), may have originated in religious belief. Nowadays, however, conflicts largely boil down to conflicting interests between different groups, competition over secular power, and so on. For instance, linguistic conflicts are not about the use of language on public occasions; they are about whether the users of a particular language should have better opportunities to gain access to certain resources.

Jinjiao mempertegas pendiriannya mengenai sebab terjadinya konflik etnik adalah pada soal upaya pengejaran kepentingan (*the pursuit of interest*) kelompok.

Apparently, the emphasis of ethnic identity and trans-ethnic conflicts has shifted from culture, custom, religion, language to the pursuit of interest. Since the members of each ethnic group share their history, region, religion, identity and interest, when different ethnic groups live in a city where there are so many different social networks, the 'ethnic group' becomes the very centre of activities aimed at the pursuit of collective and individual interest. (p.185)

I would suggest that the root of conflict among different ethnic groups in urban settings does not lie in their cultural diversity but in the inequality in their roles and positions. (p.183).

Daftar berikut dapat menjadi contoh bagaimana sebenarnya konflik-konflik etnik terjadi di tanah air. Konflik etnik yang terjadi di Indonesia antara 1945-1962, menurut catatan Koentjaraningrat (1993:20-25), adalah konflik etnik yang berkenaan dengan masalah negara, misalnya:

1. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), bermula dari sebagian kelompok sukubangsa Ambon menolak untuk bergabung dengan Indonesia sesudah jatuhnya Negara Indonesia Timoer seagai negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (1950-1951);
2. Peristiwa Kapten Andi Adul Azis, bekas kapten KNIL, dimulai ketika sekelompok bekas kesatuan KNIL Bugis bersama dengan kelompok gerilyawan Bugis Indonesia di Ujungpandang menantang demobilisasi. Pemberontakan ini menunjukkan ciri-ciri suatu pemberontakan etnis Bugis melawan non-Bugis;
3. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat, pengikutnya terdiri dari kelompok-kelompok gerilya Jawa Barat yang mendapat dukungan penuh dari penduduk setempat. Pemberontakan ini juga menunjukkan ciri-ciri suatu perang etnik.

4. Pemberontakan Darul Islam di Sulawesi Selatan. Gerilyawan yang memberontok sebagian besar penduduk setempat yang memperoleh dukungan dan simpati dari rakyat daerah itu.

Daftar di atas tentu masih bisa diperpanjang dengan peristiwa-peristiwa lain yang sebenarnya juga menunjukkan ciri-ciri konflik etnis, yang berpaut dengan kebijakan negara. Konflik di Ambon antara Muslim dengan Kristen, sekalipun dikatakan karena perbedaan keyakinan, namun sulit untuk tidak mengatakan bahwa negara atau kebijakan negara ikut memperuncing suasana. Hal serupa juga berlaku untuk menjelaskan konflik antara Orang Dayak dengan Madura di Kalimantan, bahkan konflik antara orang Aceh (GAM) dengan Orang Jawa sebelum Perjanjian Perdamaian RI-GAM ditandatangani.

Intinya adalah bahwa ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh salah satu pihak (sukubangsa) terhadap negara, dan ketidakpuasan itu berkaitan dengan keberuntungan yang diperoleh sukubangsa lain dari negara. Ketidakpuasan itu kemudian dilampiaskan. Pelampiasan ketidakpuasan itu sebagian dilakukan dengan tindakan-tindakan kekerasan fisik atau pemberontakan, tetapi sebagian lagi dilampiaskan melalui cara-cara lain, termasuk memekarkan daerah. Seperti diketahui dari beberapa sumber (media massa), proses-proses pemekaran wilayah pemerintahan di Sumatera Utara disertai dengan berbagai demonstrasi, dan dalam demonstrasi itu terlontar berbagai ide atau gagasan yang bersumber pada masalah-masalah kebudayaan atau etnisitas.

III. Masalah dan Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengkaji aspek kultural dalam proses pemekaran wilayah pemerintahan di Sumatera Utara. Seperti terungkap dalam seksi-seksi di atas bahwa dalam setiap terjadi pemekaran wilayah pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia, selalu terdapat sejumlah kejadian yang sepatutnya difahami secara lebih baik, sebagai bagian dari kebudayaan atau budaya politik masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini akan memusatkan perhatian pada:

1. Kelompok-kelompok primordial dan batas-batas yang dibangun oleh para pihak yang terlibat, serta tindakan-tindakan yang dilakukan secara bersama, dalam proses pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Asahan menjadi dua, yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara;
2. Pandangan, keyakinan, pengetahuan-pengetahuan dan perasaan-perasaan dalam hal ini kami pandang sebagai budaya yang 'bekerja' dalam masyarakat sehubungan dengan pemekaran wilayah pemerintahan.

IV. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan budaya politik dan menjelaskan sebab lahirnya budaya politik yang bekerja secara empirik di dalam kehidupan masyarakat, itu melalui peristiwa pemekaran Kabupaten Asahan menjadi dua, yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara, yang berlangsung cukup lama dan melahirkan banyak sekali peristiwa.

V. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah “kabupaten induk” dan “kabupaten pemekaran”. Kabupaten Induk dimaksud dalam penelitian ini adalah Kabupaten Asahan sedangkan kabupaten pemekaran adalah Kabupaten Batubara.

VI. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian etnografis. Sifatnya menyidik alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan *secara emik* oleh informan atas fakta pemekaran wilayah pemerintahan daerah setempat. Penjelasan dan alasan-alasan yang diberikan informan akan dikaji dan ditafsirkan oleh peneliti, agar kait-mait dan tali-temali dari penjelasan dan alasan-alasan yang diberikan oleh informan dapat difahami dan ditemukan relevansinya dengan persoalan yang dikaji.

Peneliti akan melakukan pencatatan-pencatatan secara terus-menerus atas data dan informasi yang diperoleh dari informan: menulis fieldnote dan merevisinya sesuai dengan penambahan pengetahuan atau informasi dari lapangan. Bahan-bahan yang dicatat adalah hasil pengamatan (observasi) dan wawancara.

BAB II

ASAHAN DAN BATUBARA

I. Lokasi dan Penghuninya

Asahan dan Batubara adalah dua nama yang sudah beratus tahun lamanya dipakai oleh orang-orang di Sumatera Utara untuk menamai wilayah atau tempat dan sekaligus menamai orang yang tinggal dan berasal dari tempat tersebut. Tempat itu ada di Kabupaten Asahan dan di Kabupaten Batubara sekarang. Secara geografis, kedua tempat dimaksud berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, dengan ketinggian antara 0 – 80 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Batubara memiliki wilayah dengan luas keseluruhan sekitar 922,2 Km². Wilayah tersebut memiliki batas-batas terdiri dari: Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan kabupaten Asahan; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka. Secara administratif Kabupaten Batubara terbagi menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, masing-masing dengan luas sebagai berikut:

Tabel 1
Luas Wilayah Dan Rasio Terhadap Luas Kabupaten Batubara
Menurut Kecamatan Tahun 2007

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kecamatan Medang Deras	65,47	7,10
2.	Kecamatan Sei Suka	171,47	18,59
3.	Kecamatan Air Putih	72,24	7,83
4.	Kecamatan Lima Puluh	239,55	25,98
5.	Kecamatan Talawi	89,80	9,74
6.	Kecamatan Tanjung Tiram	173,79	18,85
7.	Kecamatan Sei Balai	109,88	11,91
Jumlah		922,20	100,00

Sumber : BPS Kab. Asahan tahun 2007

Sementara luas Kabupaten Asahan setelah dimekarkan tinggal 371.945 hektar. Terbagi ke dalam 13 Kecamatan, 176 Desa/Kelurahan definitif. Wilayah Kabupaten Asahan di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhan Batu dan Toba Samosir, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Asahan berada pada 2^o03'00"- 3^o26'00" Lintang Utara, 99^o01'-100^o00' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 1.000 m di atas permukaan laut.

Jumlah penduduk Asahan (keadaan Bulan Juni Tahun 2008) diperkirakan sebesar 688.529 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 185 jiwa per km². Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan yaitu sebesar 70,56 persen dan sisanya 29,44 persen tinggal di daerah perkotaan. Jumlah rumah tangga sebanyak 162.093 rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata

dihuni oleh sekitar 4,3 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2008 sebesar 1,76 persen.

Berdasarkan data tahun 2007, mayoritas penduduk Asahan menganut agama Islam, yaitu sebesar 594.250 jiwa (87,83 persen), disusul Protestan sebesar 65.769 jiwa (9,72 persen), Budha sebesar 9.079 jiwa (1,34 persen), Katolik sebesar 7.085 jiwa (1,05 persen), dan Hindu sebesar 382 jiwa (0,06 persen). Sedangkan dari segi kesukubangsaan (etnistas), penduduk terbesar Kabupaten Asahan adalah Jawa (59,11 %), Batak (29,68 %), Melayu (5,32 %), sisanya (5,89 %) terdiri dari Minangkabau, Banjar, Aceh dan lainnya.

Penduduk yang tinggal atau berasal dari kedua kabupaten (Asahan dan Batubara) ini sering dinamakan Orang Asahan dan Orang Batubara. Tetapi, tidak pula jarang, disebut Melayu Asahan dan Melayu Batubara. Ada kata 'Melayu' ditempelkan di sana karena secara kultural daerah ini merupakan daerah Melayu; walaupun secara genealogis banyak dari mereka adalah keturunan Jawa, dan yang mengaku berasal dari daerah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Simalungun, Minangkabau, Aceh dan yang lainnya. Tanda mereka berasal dari Tapanuli dan Simalungun antara lain memiliki *marga* (klen). Seperti diketahui *marga* merupakan salah satu ciri dari masyarakat Tapanuli (seperti misalnya Batak Toba dan Mandailing) dan masyarakat asal Simalungun.

Pengenalan diri orang-orang dari Asahan dan Batubara sebagai Melayu, sekalipun mereka sebagian memiliki *marga*, terkait erat dengan kedaulatan kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di

Pantai Timur Sumatera pada masa lalu. Kerajaan-kerajaan Melayu, seperti dikatakan oleh Anthony Reid (1987:24), memiliki raja yang salah satu keahlian khasnya adalah mampu:

“menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan penduduk yang suka merompak dan suku-suku lain yang lebih besar jumlahnya, tanpa mengorbankan nilai-nilai adat kebiasaannya. Sebaliknya, justeru bandar pelabuhan yang sekaligus dijadikan ibukotanya yang berangsur-angsur menyerap unsur-unsur yang mulanya tidak terkendalikan itu ke bawah pimpinan kekuasaannya. Sesungguhnya dinasti-dinasti Melayu di Sumatera Timur itu adalah keturunan dari campuran darah suku-suku Batak, Minangkabau, Aceh dan unsur-unsur India yang lebih dominan jika dibandingkan dengan kemurnian darah keturunan para sultan di Malaka dan Johor”.

Reid (1987:24) lalu mempertegas pernyataannya di atas:

“Sudah tentu, adalah sifat kebijaksanaan dan keahliannya yang khas ini yang telah memungkinkan kebudayaan Melayu akhirnya berkuasa di pelabuhan-pelabuhan pantai Sumatera Timur (antara Langkat dan Siak), menggantikan pengaruh dari Aceh yang sebelumnya telah memperkenalkan gagasan kerajaan kepada suku-suku Batak Karo dan Batak Simalungun pada abad keenambelas”.

Walaupun kebudayaan Melayu akhirnya berpengaruh besar di pantai Timur Sumatera Utara, masih menurut Reid (1987:26), kerajaan-kerajaan Melayu ini sebenarnya lemah secara ekonomi dan militer:

“Meskipun mereka raja yang disembah dan diagungkan sebagai penguasa yang berdaulat, yang ditakdirkan Tuhan, pada kenyataannya mereka adalah raja-raja kecil dan terpecah-pecah yang

saling bersaing untuk mendapatkan kontrol atas perdagangan barang yang mengalir dari pedalaman Batak..... mereka bekerjasama dengan pedagang-pedagang asing dan pendekar-pendekar perang jika sesuai dengan kepentingan mereka. Kekuasaan kolonial Belanda secara nyata telah meningkatkan kepentingan hampir semua raja-raja di Sumatera Timur”.

Dalam pada itu ada juga raja yang muncul dengan kesuksesan, dan raja yang paling sukses hanya ada empat. “Ada empat raja yang muncul paling sukses dari saling rebutan dan persaingan pada tahun 1860-an”, kata Reid. Mereka adalah: Langkat, Deli, Serdang dan Asahan. “Mereka dianugerahi titel Sultan oleh Belanda, di samping kekayaan yang melimpah-limpah, keamanan yang terjamin, dan penerusan kekuasaannya atas raja-raja kecil Melayu dan kepala-kepala suku Batak di daerah tetangganya”. Namun raja yang paling kaya hanya tiga: Deli, Langkat dan Serdang. Yang lainnya, termasuk Asahan, dianggap tidak kaya. Bahkan, kecuali Asahan, umumnya yang lain itu (sekitar 9 kerajaan) dianggap sangat kecil dan tak mempunyai daya andalan dalam berunding dengan Belanda (Reid 1987:93).

Batubara berbeda dari Asahan. Reid (1987) mengatakan Batubara adalah semacam konfederasi sejumlah raja-raja kecil. Penduduknya berasal dari perantau Minangkabau² yang datang ke daerah itu pada abad 18. Lokasi daerah Batubara dimaksud ada di

² Lihat juga Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas 1984), hal., 83. Tidak hanya ke Batubara orang Minangkabau menyebar, tetapi juga ke Aceh Selatan dan Barat serta Negeri Sembilan Malaysia, kata Hamka.

sebelah Utara Asahan, yaitu antara Sukudua hingga Indrapura. Menurut Abdul Kadir Simorangkir (2009:31) atas informasi yang diperolehnya dari dalam karya Lukman Sinar (Buku: *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*) bahwa ada beberapa informasi penting yang perlu digarsibawahi: (1) ada lima suku terdapat di Batubara, yaitu : Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Boga; (2) tiap suku dipimpin oleh datuk; (3) Batubara ketika itu masih menjadi bagian dari kerajaan Siak-Johor; dan (4) pemimpin Batubara saat itu disebut Bendahara.

Berdasarkan cerita rakyat, kata Simorangkir (2009:50) melanjutkan, orang Minangkabau itu datang ke Batubara dengan mengendarai kapal "Gajah Ruku". Mereka menempuh perjalanan melalui jalur sungai Kampar. Simorangkir tampaknya meyakini kebenaran cerita kedatangan orang Minangkabau sebagai perantau di Batubara³. Sebagai bukti, katanya, bisa dilihat dari adanya kesamaan nama-nama suku di Batubara dengan nama-nama tempat yang ada di Minangkabau, yaitu misalnya: *luhak*⁴ Tanah Datar, *luhak* Lima Puluh Koto, dan *luhak* Agam. Dalam adat istiadat Minangkabau dikenal ungkapan adat: *Luhak nan tigo*⁵ (Luhak yang tiga).

³ Hal senada dapat juga dilihat dalam Anonimus, **Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah** (Medan: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara 1994), hal.: 69.

⁴ Sulit sebenarnya mencari padanan lahak dalam Bahasa Indonesia. Namun umum mengatakan, lahak sama atau setara dengan kabupaten.

⁵ Ibid

Kalau hubungan antara Minangkabau dengan Batubara itu benar seperti yang telah dikonstruksikan, sebenarnya masih ada hal lain yang barangkali bisa ditambahkan untuk memperkuat konstruksi dimaksud. Di Minangkabau ada juga 'kabupaten' bernama Pesisir; sama seperti nama salah satu suku di Batubara tadi. Pesisir merupakan bagian dari Pariaman, yang oleh orang Minang lazim disebut rantau. Selain itu tentu istilah 'suku' itu sendiri. *Suku*, dalam khasanah kebudayaan Minangkabau, mungkin dapat disamakan dengan *marga* atau *klen*.

Hal ini bisa kita lihat dalam ucapan: "*Suku* ayah tidak sama dengan *suku* anak⁶". Tiap suku, seperti di Batubara, dikepalai oleh Kepala Suku, biasanya bergelar *datuk*. Suku-suku hidup bersama dalam *Nagari*⁷.

Satu istilah lagi yang kami kira bisa diketengahkan untuk membahas adanya hubungan antara Batubara dengan Minangkabau adalah *Laras (Lareh)*. Di Batubara ada nama *suku* Lima Laras, sementara di Minangkabau ada *Lareh nan duo* (Laras yang dua). *Lareh nan duo* itu ialah Budi Caniago dan Koto Piliang. *Lareh* itu sendiri artinya adalah sistem adat-istiadat atau pergaulan hidup yang terdapat di dalam nagari-nagari. Budi Caniago adalah adat bersifat

⁶ Artinya adalah bahwa *klen* si ayah tidak turun kepada anaknya, karena *klen* si anak berasal dari *klen* ibunya. Dalam antropologi sistem serupa ini disebut dengan sistem *matrilineal*; sistem yang menghitung keturunan berdasarkan garis ibu (perempuan).

⁷ Hamka (1984:85) menulis seperti berikut: "Tiap-tiap nagari berdiri dengan adatnya. Nagari-nagari dan Koto-koto di Minangkabau adalah laksana Republik kecil-kecil, yang merdeka mengatur diri sendiri dalam wilayahnya masing-masing. Kerajaan Minangkabau yang berkedudukan di Pagarruyung hanyalah sebagai Payung Panji penjaga martabat ke luar saja. Nagari-nagari mempunyai kemerdekaan penuh, diperintah oleh Kerapatan Ninik-Mamak atau Pangulu Andiko".

demokrasi sedangkan Koto Piliang adalah adat bersifat aristokrasi. Penduduk tiap *nagari* berhak memilih sendiri apa yang disukainya di antara susunan kedua laras itu⁸.

II. Sejarah Politik

Secara sepintas telah kita singgung beberapa istilah atau nama berkenaan dengan Asahan dan Batubara. Kita telah menyebut hubungan Kesultanan Asahan dengan Pemerintah Jajahan Belanda terkait proses "pembesarnya" menjadi kesultanan. Selain itu kita juga sudah mendengar adanya hubungan antara Batubara dengan Kesultanan Siak. Batubara yang merupakan konfederasi dari lima suku asal Minangkabau, itu merupakan sebuah bagian dari Kesultanan Siak, dengan pimpinannya dinamakan Bendahara.

Bendahara diangkat oleh Sultan Siak dan berkedudukan di Boga. Bendahara dibantu oleh suatu dewan yang terdiri dari orang-orang yang diangkat dari keempat suku selain Boga. Mereka adalah seorang **Syahbandar**; dipilih dari kalangan suku Tanah Datar. Kemudian seorang **Juru Tulis**, dipilih dari kalangan suku Lima Puluh. Selain itu ada **Mata-mata**; jabatan ini diduduki oleh orang

yang berasal dari suku Lima Laras. Terakhir adalah **Penghulu Batangan**; penghulu batangan dipilih dari kalangan suku Pesisir⁹.

⁸ Keterangan lebih lanjut lihat Hamka, *ibid.*, 1984.

Numku Bindahara, tulis Anderson dalam bukunya yang berjudul *Mission to The East Coast of Sumatra in 1823* (1971:310-311), adalah pemimpin Batubara saat dia (Anderson) ke sana. Pemimpin yang sudah 19 tahun memerintah itu adalah seorang Penghulu dari Siak. Di bawah dia ada 5 pemimpin lain, dipanggil *datus* (datuk), yaitu: Wan Ahmet gelar Sri Maharaja Lela; Kota gelar Sibidiji Rajah; Che Wang gelar Samoangsa; Wan Nordin gelar Paduka Sri Usmana; dan Solyman gelar Seagar Rajah.

Anderson menjelaskan susunan organisasi 'pemerintahan' negeri Batubara lebih lanjut. Dia mengatakan bahwa di bawah para datuk itu tadi masih ada 20 petugas resmi lainnya. Petugas-petugas ini disebut penghulu. Penghulu atau pengulu-pengulu ini memiliki tugas berbeda-beda di beberapa distrik dan kampung. Di samping mereka (para pengulu) ada pula Tumungong (Abdullassip), yang mempunyai otoritas pokok di Kampung Boga.

Sekurang-kurangnya sampai pemerintah kolonial Belanda mulai berkuasa, pengorganisasian negeri Batubara mungkin masih seperti tergambar di atas: Siak berkuasa atas Batubara. Wakil Siak di Batubara adalah Bendahara. Bendahara dibantu oleh dewan yang terdiri dari para Datuk serta sejumlah penghulu. Keadaan serupa ini berlangsung hingga Belanda menancapkan kaki dan kekuasaan kolonialnya di sana. Pemerintah Hindia Belanda, seperti biasa, selalu campur tangan menyusun organisasi wilayah jajahannya.

⁹ Simorangkir (2009:52).

Belanda masuk ke Sumatera Timur melalui Ekspedisi Militer yang berlangsung dua tahap. Ekspedisi Militer tahap pertama terjadi pada 1862 dan Ekspedisi Militer tahap dua berlangsung pada tahun 1865 (Tunku Luckman Sinar Basyarsyah II, 2009a). Akibat dari ekspedisi militer tersebut sejumlah kerajaan ditaklukkan atau setidaknya-tidaknya berada di bawah pengaruh langsung Pemerintah Kolonial Belanda.

Dari catatan Basyarsyah (2009a) tersebut di atas dapat ditarik beberapa hal penting tentang akibat dari Ekspedisi Militer Belanda I dan ke II. Akibat Ekspedisi Militer Belanda I yaitu: (1) Beberapa negeri seperti Panai, Bilah, dan Kotapinang berhasil ditundukkan; (2) Belanda berhasil memasuki Kuala Serdang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian secara paksa antara Belanda dengan Sultan Basyarsyah yang menyebutkan bahwa Belanda turut mengakui jajahan Serdang, yaitu Denai, Percut, Padang, Perbaungan, dan Bedagai; (3) Sultan Deli bersedia menandatangani pernyataan tunduk kepada Belanda dengan kalimat yang berbunyi "Mengikuti pada negeri Siak bersama-sama bernaung pada Gubernemen Belanda".

Sementara itu akibat dari Ekspedisi Militer Belanda II adalah: (1) Pasukan Belanda (pimpinan Nethser) mendarat di Batubara (menangkap Datuk Lima Laras) dan masuk ke Asahan melalui jalan darat, sedangkan armadanya menuju Tanjung Balai memudik Sungai Asahan dan mengeluarkan pengumuman untuk memecat

Sultan Ahmadsyah dan menyerahkan pimpinan kerajaan kepada Raja Muda Naamatullah; (2) Ekspedisi Belanda lalu menyerang Serdang pada tanggal 30 September 1865, wilayah Percut, Denai, Padang, Bedagai, dan Serdang diambil alih dan diberikan kepada Deli; (3) Dari Serdang, Armada Belanda mengepung Pulau Kampai dan menghancurkan benteng Aceh pada tanggal 8 Oktober 1865; (4) Temiang ditundukkan pada tanggal 12 Oktober 1865.

Perubahan besar terjadi setelah Belanda berkuasa di Sumatera Timur. "Perjanjian Sumatera yang ditandatangani tahun 1871 antara Belanda dan Inggris membuka kesempatan bagi Belanda untuk bertindak bebas di Sumatera, termasuk di Aceh", tulis Perett (2010:208). Belanda mengadakan reorganisasi hubungan-hubungan di antara kerajaan-kerajaan yang otomatis berada di bawah kendalinya. Salah satu pengorganisasian yang diciptakan Belanda adalah *residentie Oostkust* (Residensi Pesisir Timur) dengan ibukota ditetapkan di Bengkalis (Perett 2010:208) pada 15 Mei 1873 (Basyarsyah II 2009b). Merujuk pada Basyarsyah II, residensi Pesisir Timur Sumatera terbagi atas Afdeeling Deli (Kontrolir di Labuhan), Afdeeling Asahan (Kontrolir di Tanjung Balai), dan Afdeeling Labuhan Batu. Residen pertama adalah J. Locker de Bruijne.

Masih menurut catatan Basyarsyah (2009b), pada tahun 1887 ibukota Sumatera Timur dipindahkan dari Bengkalis ke Labuhan, kemudian ke Medan dengan berbagai reorganisasi, yaitu diciptakan lebih banyak Onderafdeeling yang dikepalai seorang

Kontrolir Belanda. Menurut perubahan dalam Staatblad 1978/207, tulis Basyarsyah, Afdeeling Deli dirombak menjadi:

1. Afdeeling Deli (assisten residennya di Medan), terdiri atas:
 - a. Onderafdeeling Medan (kontrolirnya di Medan)
 - b. Onderafdeeling Labuhan (kontrolirnya di Labuhan)
2. Afdeeling Langkat Hulu (kontrolirnya di Binjai);
3. Afdeeling Langkat Hilir (kontrolirnya di Tanjung Pura);
4. Afdeeling Tamiang (kontrolirnya di Seruwei);
5. Afdeeling Serdang (kontrolirnya di Lubuk Pakam);
6. Afdeeling Padang-Bedagai (kontrolirnya di Tebing Tinggi).

Selanjutnya Basyarsyah II (2009b) mengatakan:

“Dalam Staatblad 1900/64 Residensi Sumatera Timur mengalami reorganisasi lagi, karena mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi. Terakhir menurut Beslit Gubernur 6 Juli 1915 ao. 3 status Residensi Sumatera Timur dinaikkan menjadi gouvernement (provinsi) yang berkedudukan di Medan dan pimpinan pertama kali dipegang oleh Gubernur S. Van der Plass”.

Secara administratif, lanjut Basysarsyah II, Sumatera Timur kemudian dibagi atas:

1. Afdeeling Deli dan Serdang
 - a. Onderafdeeling Deli Hilir
 - b. Onderafdeeling Deli Hulu
 - c. Onderafdeeling Serdang
 - d. Onderafdeeling Padang dan Bedagai

2. Afdeeling Langkat

- a. Onderafdeeling Langkat Hilir
- b. Onderafdeeling Langkat Hulu

3. Afdeeling Simelungun dan Tanah Karo

- a. Onderafdeeling Simelungun
- b. Onderafdeeling Tanah Karo

4. Afdeeling Asahan

- a. Onderafdeeling Asahan
- b. Onderafdeeling Batubara
- c. Onderafdeeling Labuhan Batu

5. Afdeeling Bengkalis

- a. Onderafdeeling Bengkalis
- b. Onderafdeeling Siak
- c. Onderafdeeling Bagan Siapi-api
- d. Onderafdeeling Rokan
- e. Onderafdeeling Kampar Kiri

Susunan organisasi *gouvernement* Sumatera Timur seperti tertera dalam daftar di atas mengalami perubahan beberapa kali lagi. Perubahan dimaksud tidak lain adalah berupa reorganisasi: penggabungan dan pemekaran wilayah. Terakhir pada tanggal 1 Januari 1940, Afdeeling Bengkalis dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Timur dan dimasukkan ke Residensi Riau (Basyarsyah II

2009b). Lalu beberapa tahun kemudian, seperti kita ketahui, perubahan terhadap organisasi 'pemerintahan' terjadi kembali. Perubahan kali ini dilakukan oleh pemerintah Jajahan Jepang.

Jepang tidak terlalu lama menjajah di Sumatera Timur dibandingkan dengan Belanda. Masuk melalui Penang sekitar Maret 1942, menyerah kalah kepada Tentara Sekutu pada bulan Agustus 1945, di mana pada waktu itu kaum pergerakan nasional Indonesia kemudian mengambil kesempatan emas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Namun demikian Jepang sempat mengadakan perubahan pada organisasi pemerintahan yang sudah ada di Hindia Belanda. Tetapi memang dampaknya tidak terlalu mendasar karena bagi Jepang "minyak dan hasil-hasil perkebunan Sumatera Timur adalah jauh lebih penting dari pada tujuan-tujuan politik" (Reid 1987:156). Perubahan yang dilakukan Jepang setelah berhasil menduduki wilayah Hindia Belanda, menurut catatan yang kami peroleh, adalah membentuk pemerintahan militer untuk membantu kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya (Anonimus 1994: 157).

Inti dari perubahan dimaksud dapat ditangkap sedikit dalam kutipan berikut:

Pada masa penjajahan Jepang, Pemerintah Militer Jepang di Indonesia **menghapuskan sistem dualisme pemerintahan**, khususnya di lingkungan pemerintah di daerah. Dengan demikian sejak zaman Jepang tidak dikenal lagi Europeesch Bestuur maupun Indisch Bestuur. Demikian pula halnya dengan pemerintahan di lingkungan Golongan

Timur Asing, yang ikut terhapus pula. Selain itu sistem otonomi juga dihilangkan oleh pemerintah Militer Jepang di Indonesia. Dalam hal ini ikut terhapus pula semua Swapraja di daerah seberang. Sedangkan di daerah Yogyakarta dan Surakarta diberi status sebagai Kooti (daerah istimewa).

Khusus di Sumatera Timur, pada masa pendudukan Jepang, “dominasi kerajaan mulai merosot dengan tajam” (Suprayitno 2001:49). Suprayitno mencatat, martabat sultan dan raja-raja memudar di mata masyarakat. Pada setiap upacara para sultan dan raja-raja diperintahkan berdiri sejajar dengan para pemimpin pergerakan politik sambil menyanyikan lagu memuja Jepang. Lebih tragis lagi, tambah Suprayitno, raja dan kaum bangsawan harus mengayunkan cangkul untuk memberi contoh kepada rakyat tentang pertanian dan ikut dalam kegiatan gotong royong¹⁰.

Secara tidak langsung Suprayitno menghubungkan keadaan ‘merosotnya dominasi kerajaan’ dengan kondisi ‘sosial ekonomi yang hancur’. Indikasi ‘sosial ekonomi yang hancur’ itu adalah surplus produksi dari daerah Karo dan Tapanuli Selatan tidak dapat didistribusikan ke daerah perkebunan di Sumatera Timur gara-gara infrastruktur jalan yang hancur akibat perang. Jepang, kata Suprayitno, tidak mau memperbaiki infrastruktur itu. Jepang malahan mengambil tindakan menghadapi krisis ekonomi dengan memutuskan mengambil semua tanah perkebunan menjadi milik Kekaisaran Jepang, dan semuanya di bawah kontrol langsung

¹⁰ Lihat juga Reid 1987: 180

Pemerintah Militer Jepang. Ini berarti bahwa hak istimewa penguasa tradisional dan hak sewa tanah, dengan demikian, terhapuskan.

Selain itu, sekitar 250.000 hektar tanah perkebunan didistribusikan kepada penduduk untuk mengatasi masalah pangan, lanjut Suprayitno. Tanah kosong di perkebunan tembakau diperintahkan ditanami padi, jagung dan sebagainya. Lalu, pada tahun 1944, Badan Pengurusan Pertanian mengumumkan semua tanah kosong di perkebunan diserahkan kepada petani penyewa. Sementara di beberapa tempat (daerah) perkebunan sekitar Medan dan Langkat, lahan perkebunan diubah menjadi areal persawahan sebagai penghasil padi dan sayur-sayuran. Dengan demikian, tak bisa dihindari, muncullah aktivitas pengambilalihan hak-milik-tanah oleh pendatang atas tanah leluhur orang Melayu (Suprayitno 2001: 45-47).

“Perkembangan’ ini, menurut Suprayitno lebih lanjut, membuat hubungan antara kaum pergerakan (yang mendukung kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang seputar tanah perkebunan) dengan kerajaan dan petani Melayu menjadi terpolarisasi. Para pendatang yang menduduki tanah leluhur orang Melayu tadi, bahkan, diindoktrinasi pula oleh kaum pergerakan (yang diperbolehkan oleh pemerintah Jepang) dengan sentimen anti kerajaan. Walaupun aristokrat Melayu menyusun gerakan bawah tanah untuk merespon ‘perkembangan’ ini, tetapi Jepang membubarkan ‘gerakan bawah tanah’ itu. Tokoh-tokohnya sebagian dihukum mati. Tokoh yang masih hidup, meneruskan gerakan bawah tanah ini dan mendirikan organisasi bernama Siap Sedia (SS).

Tujuannya antara lain melindungi identitas penduduk asli dan membangun otonomi politik Sumatera Timur. Sehubungan dengan itu, organisasi ini juga menjalin hubungan dengan Pemerintah Hindia Belanda yang telah mengungsi ke Australia. SS juga mendirikan organisasi 'Persatuan Anak Soematra Timur' yang didominasi oleh orang Melayu, yang dipimpin Dr. T. Mansoer dan Ustad Kadir (aktivis SS), dengan tujuan untuk mendapatkan kembali hak mereka sembari menahan derasny arus pendatang penyerobot tanah leluhur mereka.

Terbentuknya Panitia Penyelidik Kemerdekaan pada tanggal 25 Juli 1945, yang hanya memasukkan satu orang wakil kerajaan di dalamnya, dan bahkan ketika ada rapat di Jakarta wakil kerajaan satu-satunya ini tidak masuk pula dalam delegasi, itu makin memperjelas kemerosotan kerajaan dalam percaturan politik di Sumatera Timur. Bukti kemerosotan kerajaan paling nyata adalah ketika PPKI yang bersidang 22 Agustus 1945, itu memutuskan Mr. T. M. Hasan sebagai Gubernur Sumatera, dan Dr. Amir sebagai Wakil Gubernur. Kaum bangsawan kerajaan tidak satu pun tampil dalam pemerintahan republik Indonesia.

Sistem administrasi pemerintahan semasa Pendudukan Jepang, seperti telah disinggung di atas, tidak terlalu banyak diubah. Dari buku 'Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara', perubahan boleh dikata hanya terjadi pada tingkat personalia. Ambil contoh di Tanah Karo. Setiap residen Belanda digantikan oleh seorang Chokan Jepang dan kedudukan

Asisten Residen yang mengepalai afdeeling (kabupaten) digantikan oleh Bushuco Jepang. Di bawah tingkat afdeeling semua jabatan dipegang oleh pejabat pribumi setempat, kecuali pada tempat yang penting seperti Kabanjahe dan Tebing Tinggi. Di kedua tempat ini pejabatnya adalah Bunshuco (Gunseibu) Jepang, dan wakilnya adalah Futu Bunshuco.

Sibayak-bayak yang diangkat Pemerintah Belanda dan para pegawainya, itu tetap diakui eksistensinya oleh Jepang. Lima *Lanschap* yang ada, yaitu Sarinembah, Suka, Barusjahe, dan Kuta Buluh, pun dapat dipertahankan pemerintahannya. *Urung* serta *Kuta* dan *Kesain*, yang ada di zaman Belanda, tetap berlaku bersama-sama dengan lembaga adat *rakut sitelu*, *tutur siwaluh*.

BAB III

PEMBENTUKAN KABUPATEN BATUBARA

I. Proses Pembentukan Kabupaten Batubara

Kabupaten Batubara dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang disahkan pada 2 Januari 2007 sebagai hasil dari suatu usaha panjang pemekaran Kabupaten Asahan. Usaha-usaha dalam rangka pembentukan kabupaten Batubara yang muncul beberapa kali dalam sejarah, semuanya mengalami kegagalan. Sejarahnya panjang sekali; tidak cukup ditarik hanya dari masa setelah reformasi atau jatuhnya rejim otoriter Orde Baru (Mei 1998). Sebab ide tentang pembentukan Kabupaten Batubara sudah muncul sejak puluhan tahun silam. Simorangkir (2009) membagi sejarah pembentukan Kabupaten Batubara ke dalam tiga tahap perjuangan, masing-masing: (1) perjuangan tahun 1950-an; (2) perjuangan tahun 1969; dan (3) perjuangan tahun 1999-2006. Informasi perjuangan 1950-an dan perjuangan tahun 1969, itu diperolehnya dari catatan O.K. Muchtar Tanjung, sementara perjuangan tahun 1999 – 2006 direkonstruksinya berdasarkan hasil penelitian lapangan.

O.K. Muchtar Tanjung (Simorangkir 2009) menyatakan bahwa sejak tahun 1950 gagasan mendirikan Kabupaten Batubara, pisah dari Kabupaten Asahan, itu sudah mencuat; tidak lama setelah Negara Sumatera Timur bubar. Gagasan tersebut mencuat bersamaan dengan gagasan pembentukan Kabupaten Asahan Labuhan Batu (ASLAB). Pernah ada musyawarah beberapa tokoh

masyarakat di Pulau Rakyat yang dihadiri Usman YS, Abdullah Eteng, Abdul Murat, Junta Bahrum, M. Talib Siregar dan Muchtar Tanjung membahas hal itu. Hasil yang diperoleh dari musyawarah itu adalah bahwa Abdullah Eteng meneruskan cita-citanya mendirikan/ menggabungkan Asahan Selatan dengan Labuhan Batu (ASLAB) sementara yang lain (UsmanYS dkk.,) menggulirkan pembentukan Kabupaten Batubara.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Pulau Rakyat pada 15 Agustus 1950, Usman YS mengadakan pertemuan lanjutan di Labuhan Ruku. Pertemuan kali ini melahirkan suatu kepanitiaan bernama **Panitia Pembentukan Kabupaten Batubara**. Kepanitiaan ini diketuai oleh Usman YS sendiri. Terlibat juga dalam kepanitiaan tersebut para camat di seluruh Batubara Utara dan Batubara Selatan. Akan tetapi kepanitiaan ini gagal mencapai tujuannya karena dihalang-halangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI menghalangi usaha pemekaran Asahan dan atau pembentukan Kabupaten Batubara, ini tidak lain karena motor penggerak upaya pemekaran terdiri atas orang-orang yang berasal dari Partai Nasional Indonesia (PNI); partai yang diketahui merupakan saingan terbesar PKI pada saat itu.

Pada tahun 1969 masyarakat Batubara kembali bangkit keinginannya memperjuangkan pembentukan Kabupaten Batubara. Kebangkitan kali kedua ini ditandai oleh pembentukan suatu kepanitiaan bernama **Panitia Penuntut Otonomi Batubara (PPOB)**. Panitia diketuai oleh Abdul Karim AS, tokoh masyarakat yang pernah

menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan. Usaha panitia ini pun mengalami kegagalan. Panitia tidak berhasil menjalankan misinya menuntut otonomi dari Kabupaten Asahan, antara lain lantaran terhambat oleh belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan daerah otonom.

Hasrat untuk membentuk Kabupaten Batubara, walau sudah gagal beberapa kali, nampaknya tidak pernah padam. *Api* pemekaran itu tetap membara di dalam sanubari rakyat Batubara. Dan tidak tertahankan lagi ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 diberlakukan oleh pemerintah. Sejak itu bara yang redup setelah tiga puluh tahun berlalu, itu tiba-tiba merebak seperti tersiram bensin, menyambar dan membakar semangat orang Batubara. Kali ini gelora api pemekaran melanda lebih kuat pada kaum muda. Mereka tampil di garis depan perjuangan. Orang kebanyakan, petani ataupun nelayan, berbicara dengan sesamanya di tempat-tempat umum, di warung-warung kopi, ihwal pembentukan Kabupaten Batubara yang sudah pernah digagas oleh orang-orangtua mereka puluhan tahun silam.

Banyak peristiwa penting berkenaan dengan pemekaran Kabupaten Asahan, terjadi setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diterbitkan. Walaupun berlakunya UU yang kerap dinamai UU Otonomi Daerah itu baru dua tahun kemudian, tahun 2001, namun dengan adanya UU ini

masyarakat di daerah di mana pun di Indonesia semakin bergairah menuntut otonomi. Simorangkir (2009) mencatat sebuah *event* penting berkenaan dengan proses pemekaran Asahan dan pembentukan Kabupaten Batubara, yaitu acara '**Bolo Kampung**' yang diadakan di Medan pada tahun 1999. Acara ini bertempat di kampus Amir Hamzah Medan. Acara yang bermakna "memperbaiki kampung halaman", ini dihadiri oleh sejumlah perantau asal Batubara. Di sinilah gagasan membentuk Kabupaten Batubara mulai lebih mengkrystal karena ia bukan hanya diperdebatkan saja tetapi juga sudah melangkah lebih maju. Sudah ada kesepakatan di kalangan para perantau yang terlibat pertemuan itu untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang konkret ke depannya; misalnya sosialisasi wacana pembentukan Kabupaten Batubara terlepas dari kabupaten Asahan. Caranya antara lain dengan memanfaatkan segala kesempatan umpamanya event di mana orang Batubara tengah berkumpul dalam suatu acara yang dimungkinkan untuk dapat menyampaikan informasi atau gagasan mendirikan Kabupaten Batubara kepada masyarakat.

Salah satu momen yang tidak dilewatkan oleh orang-orang Batubara buat mensosialisasikan pembentukan Kabupaten Batubara adalah ketika diadakan pertemuan Orang Melayu Se-Sumatera Utara tahun 2000 dalam rangka Gerakan Tabungan Serentak (**GERTAK**). Hadir dalam kesempatan ini tokoh-tokoh penting Orang Melayu, termasuk Gubernur Sumatera Utara ketika itu, T. Rizal Nurdin; Bupati Kabupaten Langkat Syamsul Arifin dan Bupati Kabupaten Asahan Risuddin. Sesuai agenda acara, Ketua Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) M. Amin Rais hadir sebagai pembicara mengenai Otonomi Daerah. Seperti diketahui tema Otonomi Daerah saat itu sedang sangat gencar dibicarakan di daerah manapun di Indonesia. Orang sedang bergairah mengulas Otonomi Daerah beserta seluruh implikasinya. Oleh karena itu maka ketika sesi tanya jawab berlangsung, peserta dari Batubara langsung bertanya tentang kemungkinan membentuk Kabupaten Batubara dengan cara memekarkan Kabupaten Asahan. Jawaban Amin Rais selaku Ketua MPR saat itu sangat jelas memberi isyarat membolehkan pembentukan Kabupaten Batubara. Sebuah jawaban politis yang sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Batubara. Dan pengaruhnya jelas terasa seketika. Begitu hal serupa ditanyakan kepada Bupati Kabupaten Asahan Risuddin, sang Bupati pun berkata tidak keberatan dengan gagasan pemekaran Kabupaten Asahan/ Pembentukan Kabupaten Batubara (Simorangkir 2009).

Efek politis dari jawaban-jawaban para pemimpin politik dalam kesempatan di atas, itu bergema jauh ke luar gedung pertemuan GERTAK 2000. Harapan pemuda untuk memekarkan Kabupaten Asahan dan mendirikan Kabupaten Batubara kemudian menjadi semakin kuat, walaupun tidak sedikit juga yang kurang percaya. Namun kenyataan menunjukkan beberapa pemuda mendirikan kelompok-kelompok pergerakan yang menjurus pada pembentukan Kabupaten Batubara, seperti Gerakan Pemuda Kabupaten Batubara disingkat GEMKARA, dan yang lainnya adalah Badan Penggalangan Potensi Masyarakat Batubara.

Menurut catatan Simorangkir (2009), ada satu lembaga lagi yang dibentuk oleh masyarakat guna memenuhi tuntutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 yaitu Badan Pekerja Persiapan Pemekaran Kabupaten Batubara, disingkat BP3KB. Badan ini mempunyai tugas antara lain melakukan kajian secara akademis tentang kelayakan wilayah Batubara menjadi kabupaten tersendiri, lepas dari kabupaten Asahan. Badan ini dianggap menaungi semua komponen masyarakat yang bercita-cita mendirikan Kabupaten Batubara, dan mereka kelak dinamakan sebagai pemrakarsa Kabupaten Batubara. Dua kelompok pergerakan di atas, Gemkara dan Badan Penggalangan Potensi masyarakat Batubara bersinergi dengan badan yang didirikan terakhir BP3KB sehingga kepanjangan GEMKARA pun berubah dari Gerakan Pemuda Kabupaten Batubara menjadi Gerakan Menuju Kabupaten Batubara. Sinergi kedua kekuatan sosial kemasyarakatan ini sering disimbolisasikan menjadi BP3KB-Gemkara atau sebaliknya Gemkara-BP3KB.

Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten Batubara (GEMKARA) tumbuh di berbagai tempat, lengkap dengan perangkat pengurus keorganisasiannya. Gemkara yang tumbuh di tiap-tiap tempat dimaksud menamakan dirinya divisi. Tiap divisi menyusun kepengurusan sendiri-sendiri; strukturnya tidak selalu seragam meski banyak yang seragam, misalnya terdiri dari Dewan Penasehat/Pertimbangan, Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara serta Seksi-seksi, di antaranya Seksi Organisasi, Seksi Humas, seksi Pengerahan Massa, dan Seksi Publikasi. Berdasarkan lampiran yang terdapat dalam dokumen

Pengkajian Teknis Masyarakat Batubara Terhadap Kesiapan Terbentuknya Kabupaten Batubara Di Wilayah Batubara, dengan Kata Pengantar oleh Tim Pengkaji bertanggal Medan, 17 April 2001, divisi-divisi Gemkara itu adalah: (1) Divisi Kecamatan Limapuluh, (2) Divisi Kecamatan Talawi, (3) Divisi Kecamatan Medang Deras, (4) Divisi Kecamatan Air Putih, (5) Divisi Kecamatan Sei Suka, (6) Divisi Kecamatan Sei Balai, (7) Divisi Kecamatan Tanjung Tiram, dan (8) Divisi Kota Medan.

Sementara itu BP3KB (Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Kabupaten Batubara) yang dibentuk secara khusus untuk menyiapkan pembentukan Kabupaten Batubara, mengambil format kepengurusannya secara presidium, dengan ketua presidium adalah Sahari Zakaria, SH dan Sekretaris Jenderal Drs. Khairul Muslim, MD. Markas besar BP3KB terletak di Jl. Yos Sudarso No. 153 Medan. Medan dijadikan tempat membangun kekuatan yang lebih strategis karena, seperti dinyatakan semula, perantau Batubara di Medan adalah pihak yang paling awal memulai gerakan memisahkan Batubara dari Asahan.

Melihat jejak perjalanan lembaga ini dari surat-surat yang terlampir dalam dokumen hasil studi yang disebutkan di atas, dan yang tak lain adalah hasil dari pekerjaannya sendiri, BP3KB termasuk pihak yang paling aktif menyurati para pihak yang berkompeten. Surat-surat untuk menyampaikan Pernyataan Sikap yang ditandatangani oleh divisi-divisi Gemkara kepada pihak-pihak manapun, itu dibuat dan disampaikan oleh ketua presidium BP3KB.

Begitu pula dengan surat-surat yang disampaikan kepada para pihak berkompeten mengenai 'aspirasi pembentukan kabupaten Batubara' yang tembusannya hingga kepada Presiden Republik Indonesia itu juga dibuat dan ditandatangani oleh ketua presidium dan sekretaris jenderal BP3KB. BP3KB seakan-akan menjadi sebuah sosok yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Batubara.

Melalui surat bertanggal Medan, 7 Agustus 2001, bernomor 17/Sek/BP3KB/VII/2001, BP3KB menyampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Asahan di Kisaran, Aspirasi Pembentukan Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara. Surat yang sama dikirim kepada Bupati Kabupaten Asahan di Kisaran, juga dengan tembusan serupa, yaitu kepada DPRD Propinsi Sumatera Utara, Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, DPR-RI, Menteri Dalam Negeri, dan Presiden RI. Isi dari surat-surat dimaksud, sesuai yang tercantum dalam pokok surat 'Aspirasi Pembentukan Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara' dengan lampiran terdiri atas:

1. Pernyataan Sikap 8 (delapan) divisi Gemkara, masing-masing ditandatangani oleh ketua Gemkara Divisi Tanjung Tiram Drs. Zulkarnain Ahmad, ketua Gemkara Divisi Talawi Ahmad Badri, ketua Gemkara Sei Balai Ahmad M. Yuss, ketua Gemkara Divisi Lima Puluh Mawardy Wenas, ketua Gemkara Divisi Air Putih Hendra Surya, S.Sos., ketua Gemkara Divisi Sei Suka Ali Efendi, ketua Gemkara Divisi Medang Deras Syamsul Amri, ketua Gemkara Divisi Medan Drs. Khairul Muslim MD dan ditambah

Ketua Presidium Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Kabupaten Batubara Sahari Zakaria, SH. Pernyataan Sikap ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2001 di Lima Puluh.

2. Hasil studi yang dilakukan oleh BP3KB berdasarkan guideline-nya Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Hasil studi ini dinamakan "Pengkajian Teknis Terhadap Kesiapan Terbentuknya Kabupaten Batubara".

Pernyataan Sikap sebagai yang terlampir dalam surat di atas dapat disimak seutuhnya berikut ini:

PERNYATAAN SIKAP

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami masyarakat wilayah Batubara Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari (Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Talawi, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Medang Deras) dengan ini menyatakan kebulatan tekad sebagai berikut:

1. Masyarakat wilayah Batubara tetap setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
2. Masyarakat wilayah Batubara siap menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai amanah dan cita-cita bangsa sampai tetes darah penghabisan.
3. Masyarakat wilayah Batubara tetap patuh dan taat pada hukum dan peraturan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum di negeri ini serta mencegah arogansi kekuasaan sesuai dengan hakekat dan semangat reformasi.
4. Masyarakat wilayah Batubara bertekad menumbuh kembangkan kehidupan demokrasi secara sehat dan dinamis untuk mewujudkan hak-hak rakyat (Hak Azasi Manusia / HAM) secara kongkrit dan dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab serta senantiasa dilandasi oleh konstitusi dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai landasan filosofi Pancasila.
5. Masyarakat wilayah Baatubara mendukung sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara konsekwen sebagai upaya untuk mensejahterakan dan memberdayakan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa masyarakat adil dan makmur.
6. Masyarakat wilayah Batubara tetap memperjuangkan terbentuk dan berdirinya Kabupaten Batubara yang terpisah secara administratif pemerintahan dari Kabupaten Asahan dan senantiasa dilandasi oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta tetap menjaga keutuhan Negara kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara nyata dan merata.

7. Masyarakat wilayah Batubara tetap mengharamkan segala bentuk tindakan destruktif dan anarkis sepanjang aspirasi masyarakat Batubara direspons secara positif sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan kebulatan tekad masyarakat wilayah Batubara diikrarkan dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab sebagai manifestasi kecintaan dan tanggungjawab sebagai anak bangsa demi kejayaan ibu pertiwi.

Pernyataan Sikap ini disampaikan kepada:

1. DPRD Kabupaten Asahan
2. Pemerintah Kabupaten Asahan
3. DPRD Propinsi Sumatera Utara
4. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara
5. MPR / DPR-RI
6. Presiden Republik Indonesia

Lima Puluh, 05 Agustus 2001

Tekanan dari Pernyataan Sikap masyarakat wilayah Batubara ini sebenarnya ada pada pernyataan nomor 6, khususnya yang dibuat bercetak tebal oleh penulis (yaitu: "**Masyarakat wilayah Batubara tetap memperjuangkan terbentuk dan berdirinya**

Kabupaten Batubara yang terpisah secara administratif pemerintahan dari Kabupaten Asahan dan senantiasa dilandasi oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta tetap menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara nyata dan merata". Di dalam pernyataan ini juga tersirat tujuan dari pemekaran Asahan dan pembentukan Kabupaten Batubara, ialah: "**untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara nyata dan merata**". Kuat terkesan bahwa selama ini, selama bergabung dengan Kabupaten Asahan, rakyat di wilayah Batubara kurang merasakan secara nyata dan merata arti dari kesejahteraan dan kemakmuran.

Pernyataan nomor 6 di atas kemudian dipertegas dengan kalimat pada pernyataan nomor 7 yang isinya secara tersirat agak mengandung ancaman, yaitu: "**Masyarakat wilayah Batubara tetap mengharamkan segala bentuk tindakan destruktif dan anarkis sepanjang aspirasi masyarakat Batubara direspons secara positif sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku**". Kalau aspirasi masyarakat wilayah Batubara membentuk dan mendirikan Kabupaten Batubara yang terpisah secara administratif dari Kabupaten Asahan ini tidak direspons secara positif, tentulah masyarakat wilayah Batubara tidak lagi mengharamkan bentuk tindakan destruktif dan anarkis.

Di lain pihak, lampiran surat bernomor 17/Sek/BP3KB/VII/2001 yang berupa hasil kajian yang dilakukan oleh BP3KB sendiri, itu menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Intinya adalah bahwa

Kabupaten Asahan sangat masuk akal untuk dimekarkan menjadi Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara. Kabupaten Asahan yang sebagian wilayahnya akan menjadi Kabupaten Batubara, itu tidak akan kesulitan apabila kelak 'ditinggal' oleh Batubara. Begitu pula sebaliknya, Batubara bisa 'berjalan' walaupun sudah berpisah dengan Asahan. Potensi ekonomi kedua wilayah, sesuai kajian yang dilakukan, berada di atas skor minimal kelulusan.

Selain itu hasil kajian juga mengangkat fakta sejarah bahwa wilayah Batubara sejak zaman sebelum penjajahan, selama penjajahan dan sesudah penjajahan (kemerdekaan) adalah sebuah wilayah tersendiri. Pernah berdiri kerajaan, menjadi afdeling tersendiri di keresidenan Sumatera Timur dan menjadi kewedanaan tersendiri di awal kemerdekaan. Atas dasar itu juga Batubara, menurut hasil kajian, patut memiliki status setara kabupaten. Hal ini dinyatakan secara lebih eksplisit dalam hasil kajian dengan bunyi seperti berikut:

“Berdasarkan sejarah sudah jelas sejak dahulu dan jaman kolonial Batubara dan Asahan adalah dua afdeling yang bertetangga, bukan dua wilayah yang disatukan. Ini berarti wilayah Batubara sewajarnya sama kedudukannya dengan Asahan, Deli, Labuhan Batu dan Bengkalis” (Anonymous 2001:35).

Satu per satu argumentasi diajukan oleh BP3KB untuk memperkuat aspirasi mereka untuk lepas dari Asahan dan membentuk kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Batubara. Argumentasi ini disampaikan secara tertulis melalui surat kepada

semua pihak yang dianggap berkompeten dalam proses pengambilan keputusan untuk membentuk Kabupaten Batubara di Republik Indonesia.

II. Respons Para Stakeholder

Tak pelak lagi usaha masyarakat sipil yang sudah semakin sistematis dan massif untuk membentuk kabupaten Batubara, sepatutnya mendapat respons bermacam-macam dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Tetapi respons paling telak datang dari pemerintah Kabupaten Asahan. Pemerintah Kabupten Asahan mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang isinya berlawanan dengan aspirasi masyarakat di wilayah Batubara. Kalimat yang secara langsung menohok pada aspirasi masyarakat wilayah Batubara, itu tertuang dalam Kegiatan Pokok Program Pembangunan Daerah, butir kedua yang menyebutkan: "Upaya rasionalisasi pola berpikir masyarakat melalui pendekatan persuasif, khususnya terhadap provokasi memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Asahan, serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampai pada tahun 2005 tidak ada pemekaran Kabupaten Asahan".

Klausul Propeda yang telah di-Perda-kan tersebut dengan tegas menolak dilaksanakannya pemekaran Kabupaten Asahan, setidak-tidaknya hingga tahun 2005. Bahkan pemerintah Asahan, selaku pihak yang akan menjalankan Propeda dimaksud, pemerintah

dengan sangat gampal menyatakan akan mengupayakan 'rasionalisasi pola berpikir masyarakat melalui pendekatan persuasif, khususnya terhadap provokasi memisahkan diri dari Kabupaten Asahan'. Ada semacam tuduhan yang agak arogan bahwa para pengusung aspirasi pemekaran dianggap tidak rasional. Dan untuk keperluan merasionalisasi pola berpikir masyarakat yang tak rasional itu, pemerintah mengatakan akan melaksanakan pendekatan persuasif terhadap mereka yang menjadi 'provokator' pemekaran.

Perdebatan tidak dapat dihindari paska munculnya Propeda yang melarang pemekaran. Perdebatan hukum, terutama, muncul berkenaan dengan hal itu. Pertanyaan pokok yang diajukan oleh pihak yang pro-pemekaran apakah sebuah Perda menganulir gagasan-gagasan yang terdapat dalam Undang-Undang? Menurut Hukum Tata Negara, itu tentu saja tidak boleh. Undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari pada Peraturan Daerah (Perda). Namun di dalam kancah sosial-politik yang tengah berlangsung saat itu, hirarki perundang-undangan tersebut agaknya tidak berjalan. Pemerintahan Asahan tetap dengan pendiriannya: "tidak ada pemekaran sampai 2005".

Seakan mendapat angin segar dalam sebuah kepengapan yang menggerahkan, masyarakat pro-pemekaran merasa mendapat nafas baru ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara berkirim surat kepada Gubernur Sumatera Utara. Isi surat Dewan bertanggal 10 Oktober 2001 dengan nomor 4673/18 Sekr, itu antara lain berbunyi (1) tidak keberatan terhadap pemekaran Kabupaten Asahan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku; dan (2) meminta Gubernur menindaklanjuti usulan pembentukan Kabupaten Batubara. Kemudian, tidak terlalu lama berselang, terbit pula lagi surat dari sekretariat DPR-RI bertanggal 19 Oktober 2001, berisi penjelasan bahwa Pimpinan Komisi II DPR-RI harus menindaklanjuti kunjungan Wakil Ketua DPR-RI ke Kabupaten Asahan beberapa waktu sebelumnya.

Simorangkir (2009: 67-77) mencatat banyak sekali dokumen resmi berupa surat-surat yang diterbitkan oleh para pihak berkenaan dengan pro-kontra pemekaran Kabupaten Asahan atau pembentukan Kabupaten Batubara. Intinya, kecuali Pemerintah Asahan, semua lembaga terkait boleh dikatakan setuju dengan pemekaran. Kita sebut saja misalnya Depdagri. Depdagri, melalui suratnya kepada Bupati Asahan, menegaskan bahwa Perda No. 6/2001 tentang Propeda Asahan yang melarang pemekaran, itu bertentangan dengan kepentingan umum dan oleh sebab itu harus dicabut/ direvisi. Bahkan pada tanggal 23 September 2003 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat keputusan bernomor 76 tahun 2003 untuk membatalkan salah satu klausul dari Kegiatan Pokok Propeda Asahan yang melarang dilaksanakannya pemekaran.

Tetapi, apa yang terjadi? Bupati asahan malahan menerbitkan surat menyatakan keberatan dan meminta Depdagri untuk mempertimbangkan pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2003 tersebut. Namun demikian Mendagri tetap dengan keputusannya: tidak membatalkan Surat Keputusan yang telah diterbitkannya.

Seperti pepatah 'mengulur-ulur waktu', itu kelihatannya berlaku dalam proses pemekaran Kabupaten Asahan. Asahan tidak akan mekar hingga tahun 2005, seperti digariskan dalam Propeda, itu betul-betul terlaksana. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, serta berbagai persetujuan telah dibuat oleh lembaga-lembaga berkompeten lainnya, termasuk dari DPR-RI serta Mendagri, itu tidak ada artinya kalau Bupati Asahan tidak menyetujui. Proses administrasi yang lambat, yang simpangsiur, itu juga ikut kontribusi dalam proses *buying time* yang dijalalakan oleh Bupati Asahan. Jarak antara satu surat dengan surat lainnya sangat lama, sementara para pihak yang harus disurati dan dinantikan surat jawabannya, itu juga sangat banyak. Singkat cerita proses politik dan administrasi pemekaran Asahan memakan waktu bertahun-tahun (kurang lebih 7 tahun). Tidak ada arti yang signifikan sebenarnya dari penunda-nundaan pemekaran ini selain dari pada hanya kontestasi kekuasaan yang menimbulkan gejolak konflik cukup dalam. Menurut Simorangkir (2009) ada sebanyak 34 kali demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh kedua belah pihak yang pro dan kontra pemekaran Asahan.

Bertahannya Mendagri dengan Surat Keputusannya bernomor 76 tahun 2003, menurut Simorangkir (2009), telah mempengaruhi sikap anggota DPRD Asahan di mana sebagian dari mereka akhirnya berbalik posisi dari semula menolak menjadi mendukung pemekaran. Tentu bukan itu saja faktor yang mempengaruhi perubahan dimaksud. Gencarnya dukungan DPRD Sumatera Utara, termasuk dari Gubernur Sumatera Utara, itu tidak pula bisa diabaikan. Demikian akhirnya DPRD Asahan pada tanggal 28 Mei 2004 menerbitkan surat untuk disampaikan kepada Bupati yang isinya meminta Bupati menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pembentukan kabupaten Batubara. Bahkan setelah itu, atas persetujuan segala pihak, pemerintah Kabupaten Asahan mencantumkan biaya Pembentukan kabupaten Batubara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan tahun 2005. Disusul kemudian pembentukan Panitia Khusus Pemekaran Wilayah Kabupaten Asahan oleh DPRD Kabupaten Asahan.

Satu surat yang paling ditunggu-tunggu dalam kasus pemekaran Asahan dan pembentukan kabupaten Batubara ialah surat usulan atau rekomendasi dari Bupati Kabupaten Asahan. Seperti diketahui, Bupati Kabupaten Asahan sejak semula telah memperlihatkan sikap menolak. Bupati Risuddin tidak setuju Kabupaten Asahan dimekarkan sebelum tahun 2005, tahun di mana ia menghabiskan masa jabatan Bupati. Ia membuktikan hal itu dengan menerbitkan surat rekomendasi atau usulan pemekaran Asahan dan pembentukan Batubara pada 11 Juli 2005 dengan nomor surat 130/4634. Atas adanya surat rekomendasi dan

dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan lainnya, maka DPR-RI pun melalui sidang paripurna tanggal 8 Desember 2006 mengambil keputusan menetapkan Batubara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara; terpisah secara administratif dari Kabupaten Asahan, dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batubara di Provinsi Sumatera Utara oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yodhoyono pada tanggal 2 Januari 2007.

BAB IV

ASPEK KULTURAL

PEMEKARAN ASAHAN DAN PEMBENTUKAN KABUPATEN

BATUBARA

Hiruk-pikuk sosial dalam pemekaran Kabupaten Asahan dan atau pembentukan Kabupaten Batubara menyisakan pelajaran, yaitu aspek budaya, atau lebih tepat lagi, budaya politik, yang belum tergali secara maksimal. Pertanyaannya adalah, pikiran apa sebenarnya yang menggerakkan orang-orang di wilayah Asahan-Batubara melakukan berbagai macam tindakan, berkenaan dengan pemekaran Kabupaten Asahan yang dikampanyekan. Seperti kita ketahui bahwa pemekaran tersebut tidak mulus berjalan; banyak rintangan dan hambatan yang harus dilalui, serta memakan waktu cukup lama. Persyaratan-persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemekaran, sebagaimana ia dipersyaratkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, sekaligus dipermainkan oleh para pihak menjadi alat untuk menghambat dan atau memperlama proses pemekaran yang disertai oleh pertarungan sosial-politik yang cukup 'keras'.

Bab ini akan kami isi dengan pembahasan mengenai budaya politik yang muncul atau bekerja di seputar pemekaran, meliputi (1) masalah primordialisme; (2) Kekerasan dan money politics; (3)

I. Primordialisme

Asahan dan Batubara atau Batubara dan Asahan adalah dua kelompok masyarakat yang sudah memiliki nama-diri (identitas) masing-masing sejak lama. Meski di mana-mana mereka selalu menyebut dan menamai diri Melayu atau Orang Melayu, seperti halnya Orang Melayu Deli, Melayu Serdang dan Melayu Langkat, namun mereka juga selalu membedakan diri secara *emic*. Perbedaan secara *emic* itu diekspresikan melalui sebutan Melayu Batubara dan Melayu Asahan. Orang non-Melayu sangat mungkin tidak dapat melihat dan merasakan perbedaan dimaksud karena perbedaan-perbedaan ini lebih berdimensi sikap-mental; tidak nampak terlalu jelas melalui penglihatan mata kasat kecuali oleh kelompok-kelompok lain yang sudah lama tinggal dan hidup-bersama dengan mereka, atau oleh para peneliti yang bekerja dengan cara melakukan observasi-partisipasi (segala hal diamati detail dari waktu ke waktu dalam kurun waktu yang cukup lama). Akan tetapi perbedaan secara *emic* tersebut, terutama dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi setempat, itu menjadi sangat penting. Persepsi dan imej yang dibangun oleh kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain menjadi penuntun bagi kedua kelompok bersangkutan pada waktu mereka masing-masing melakukan seleksi-sosial dan menentukan keputusan-keputusan publik. Orang sana atau orang sini, mereka atau kami/ kita, menjadi kata-kata yang sangat menentukan dalam segala lapangan: sosial, ekonomi dan politik atau budaya politik (*political culture*).

Dalam pembicaraan kami dengan sejumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Batubara (3 Agustus 2010 di Parapat) tentang hubungan Asahan dan Batubara, para pegawai itu menyatakan dengan sangat jelas mengenai adanya gejala keberpihakan para pengambil keputusan di ibukota Kabupaten Asahan, Kisaran, itu kepada Orang Asahan atau wilayah Asahan. Para pengambil keputusan di ibukota kabupaten Asahan (Kisaran) lebih cenderung memperhatikan 'wilayah¹¹ Asahan' dan mengenyampingkan 'wilayah Batubara'. Padahal, kata para informan kami tersebut, penghasilan terbesar Kabupaten Asahan berasal dari wilayah Batubara. Di wilayah Batubara, kata mereka, perusahaan-perusahaan besar (investor) mendirikan perkebunan dan juga industri aluminium (INALUM). "Akal sehat kita mengatakan", lanjut informan kami, "Orang Batubara semestinya lebih merasakan manfaat dari penghasilan itu dibandingkan orang Asahan. Namun kenyataan berbicara lain. Orang Asahan justru lebih menikmati hasil dari semua itu ketimbang Orang Batubara", imbuh mereka.

¹¹ Kata 'wilayah' dalam ungkapan "wilayah Asahan" dan "wilayah Batubara", itu tidak terpetakan (tidak tertulis dalam peta resmi pemerintahan) sehingga tidak bisa dilihat oleh orang dari luar. Orang luar barangkali menganggap Kabupaten Asahan adalah satu satuan wilayah administratif terdiri dari wilayah-wilayah kecamatan yang ada di bawahnya, dan sama sekali tidak mengerti dengan konsep lokal, *emic*, mengenai dua wilayah tradisional, atau *indigenous autonomy*, yaitu: wilayah Asahan dan wilayah Batubara.

Kami melihat ada rasa di lubuk hati mereka yang dalam sebagai Orang Batubara berupa perasaan dipinggirkan atau dikesampingkan oleh Orang Asahan di setiap arena seleksi atau pemilihan. Perasaan itu, seperti dikatakan oleh salah seorang informan kami: "sangat menyakitkan". Informan yang tak lain seorang pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Batubara, dan ia juga jebolan perguruan tinggi nasional ternama puluhan tahun silam, merasa bahwa kemampuan (talenta) Orang Batubara tidak kalah dengan Orang Asahan kalau diberi kesempatan yang sama untuk berprestasi. Tetapi justeru kesempatan macam inilah yang langka, kata informan ini. Peluang yang ada selalu 'diberikan' kepada orang lain, terutama Orang Asahan atau orang yang tinggal di wilayah Asahan.

Pemikiran (rasio) yang tersimpan di balik ungkapan informan kami adalah pemikiran yang berpijak pada logika keadilan (*justice*). Keadilan dalam teori gerakan sosial (*social movement*) merupakan faktor sangat penting. Revolusi-revolusi yang berlangsung pada abad 18 dan 19 yang lalu, menurut teori ini (Nash 2005:8), merujuk pada masalah keadilan yang difahami sebagai *equality* (yaitu kesamaan dalam status, hak, dan kewajiban). Jadi ada semacam diskriminasi etnik dirasakan oleh orang Batubara; seakan-akan hanya karena mereka orang Batubara lah, lalu mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang menguntungkan dari segi ekonomi atau yang lainnya. Padahal sesuatu sumber daya yang diperebutkan berada di wilayah mereka. Keuntungan mereka seakan-akan sudah direpresentasikan oleh kolompok lain yang lebih untung dari mereka.

Ini terjadi karena orang (pejabat) yang mengambil keputusan adalah orang Asahan. Ikatan primordial¹² di antara mereka (panggilan 'rumah Mumbi') membuat pejabat setempat menetapkan keputusan yang sangat boleh jadi 'tidak profesional'¹³. Akibatnya, perkembangan wilayah Batubara maupun perkembangan manusianya sangat terlambat dibandingkan wilayah Asahan. Pejabat-pejabat yang mengambil keputusan di pemerintahan Kabupaten Asahan, atau orang-orang yang dapat digolongkan berpengaruh di masyarakat Kabupaten Asahan, pada umumnya Orang Asahan. Fenomena ini berlawanan dengan logika keadilan yang diyakini kebenarannya oleh informan Batubara kami. Hal ini, menurut mereka, hanya bisa diatasi melalui pemekaran, atau otonomisasi; lepas dari pengendalian pemerintahan Asahan.

¹² Dalam pandangan kaum modernis sekuler kelompok yang membawa masuk istilah primordial dalam kamus modernisasi atau pembangunan di Indonesia primordial itu adalah nonrasional seperti berikut: "***In the secular modernist view, primordial solidarities were deep but essentially nonrational commitments to region, ethnicity, and, most important, religion.*** Lihat Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratizations in Indonesia* (USA: Princeton University Press, 2000), hal.: 75)

¹³ Persoalan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah sejak lama menjadi sorotan masyarakat di seluruh kabupaten/ kota di Indonesia karena terus berulangnya dugaan praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di sana. Hal ini membuat teori organisasi menjadi tidak berguna untuk menjelaskan birokrasi di negeri Indonesia.

Alasan formal yang mengemuka terhadap berbagai ketimpangan seperti ini selalu berputar di sekitar pendidikan, atau rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Batubara. “Dengan pendidikan yang rendah, mana mungkin seseorang diangkat menjadi pejabat?” Ini pernyataan sering didengar. Sementara di lain pihak kesempatan orang dari wilayah Batubara untuk meraih pendidikan lebih tinggi justeru sangat terbatas. Kenyataan ini jadi menyakitkan. Titik persoalannya adalah “pemerintah Kabupaten Asahan tidak mempunyai perhatian terhadap pendidikan orang-orang dari wilayah Batubara”, kata informan yang bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara ini. Dengan demikian di semua kesempatan dan atau lapangan pekerjaan yang terbuka, utamanya yang mempersyaratkan pendidikan yang relatif tinggi, maka Orang Batubara selalu kalah bersaing. Termasuk dalam kesempatan-kesempatan yang tersedia di lingkungan perusahaan perkebunan maupun di industri lainnya.

Perusahaan-perusahaan dimaksud membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, yang bersekolah tinggi, dan itu justeru yang menjadi kekurangan Orang Batubara. Sementara Pemerintah Kabupaten Asahan, sebagai pihak yang paling berpotensi membangun manusia tambah mereka itu tidak pernah bersungguh-sungguh memberikan perhatian pada pengembangan SDM kami; mereka tidak memberi kami kesempatan yang lebih luas untuk bersekolah, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kedekatan tempat tinggal Orang Batubara dengan pantai (laut), yang membuat mereka sering terperangkap sejak dini ke dalam kehidupan mencari nafkah dengan menangkap ikan di laut, itu

sering menjadi wacana (diskursus¹⁴) pembenar untuk tidak mendorong putra-putri Batubara bersekolah; meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia. Padahal yang terperangkap ke dalam tradisi nelayan sejak usia dini, itu hanya sebagian penduduk atau Orang Batubara, terutama dari penduduk yang tinggal di sekitar pantai semisal desa Bogak di Kecamatan Tanjung Tiram. Penduduk selebihnya, yaitu yang tinggal berjauhan dengan pantai, atau akses dari tempat tinggalnya ke pantai sangat jauh, maka penjelasan "terlalu dini terjun ke laut" itu menjadi sangat lamah dijadikan alasan oleh pemerintah Kabupaten Asahan terdahulu untuk tidak mendorong mereka bersekolah sejak usia dini.

Di sinilah kita kemudian bertemu sekali lagi dengan primordialisme; suatu konsep yang bisa memberi kita penjelasan, kenapa para pihak pengambil keputusan di pemerintahan Asahan selalu lebih mengutamakan Orang dan wilayah Asahan. Primordialisme suatu ikatan sosiokultural dan emosional yang terbentuk dalam hati sanubari seseorang akibat dari proses sosialisasi, enkulturasi dan internalisasi yang dialami dalam kelompok-kelompok di mana ia pertama kali hidup itu membuat orang-orang cenderung etnosentris kepada kelompok-kelompok itu. Dalam bahasa yang bernuansa sangat personal Isaacs (1993 [1974]: 2) bicara tentang loyalitas orang-orang kepada kelompoknya yang demikian, itu lebih daripada segalanya; tinggi keakraban di

¹⁴ Berdasarkan pemahamannya atas Foucault, Margaret Walshaw (2007:19) menyatakan bahwa: "*Discourses are more than ways of giving meaning to the world; they imply forms of social organisation and social practices, at different historical times, which structure institutions and constitute individuals as thinking, feeling and acting subjects*".

antara sesama anggotanya; persatuannya lebih kuat. Ke kelompok itu orang 'pulang' setelah pergi ke tempat-tempat lain, dan kepada kelompok itu orang 'kembali' setelah ia tidak yakin akan ada kehidupan lebih layak yang dia cari selama ini di tempat lain. Di mana-mana orang, kata Isaacs lebih lanjut, memugar kelompok (serupa dengan Rumah Muumbi) yang sudah mulai runtuh atau bahkan membangun yang baru.

II. Mitologi Asal-Usul

Asahan dan Batubara adalah dua kelompok primordial yang masing-masing pernah dilegitimasi menjadi satu satuan sosial politik sendiri-sendiri oleh satu kekuatan yang berada di atasnya (Pra-Penjajahan Belanda, zaman Belanda dan awal kemerdekaan RI). Kedua satuan sosial ini ada dalam tataran atau hirarki struktural yang kurang lebih sama tinggi, yaitu sama-sama sebagai kerajaan yang relatif otonom. Kemudian di masa yang lain Batubara diletakkan pada posisi lebih rendah daripada Asahan. Penataan politik oleh kekuatan yang berada di atas kedua kelompok ini membuat hubungan kedua kelompok mengalami pasang surut. Hubungan-hubungan antar kelompok primordial macam ini, secara teoritik, mempunyai sifat seperti yang diisyaratkan oleh Isaacs (1993[1974]) yaitu: (1) para pihak diperkirakan akan meningkatkan, memastikan atau memperluas daerah dan kekuasaan; (2) para pihak berdiam diri untuk menghindari kekuatan, ancaman atau kejajaman pihak lain; dan (3) para pihak hidup dengan cara lebih inklusif,

mereka mencari jalan ke luar untuk dapat hidup berdampingan dengan damai, tanpa menteror satu sama lain.

Asahan dan Batubara sudah sejak puluhan tahun lamanya hidup berdampingan dengan damai. Hidup berdampingan dengan damai tanpa teror dan kekerasan fisik, itu tidak berarti tanpa kompetisi. Kompetisi antara kedua belah pihak berlangsung terus-menerus karena, seperti diisyaratkan oleh Foucault (Cheater 1999), bahwa hubungan (relasi) antar pihak itu sebenarnya merupakan relasi kekuasaan (power relations). Tidak peduli para pihak itu berada dalam satu wadah kesatuan yang sama, misalnya sama-sama Melayu dan sama-sama penduduk Kabupaten Asahan, di situ juga berlaku hubungan kekuasaan (power relations). Foucault (Zuska 2008) menyatakan hubungan kekuasaan itu tidak mati (beku) tetapi sifatnya cair. Struktur hubungan kekuasaan dapat berubah seiring dengan kuatnya dukungan yang mengalir di antara mereka. Barang siapa memperoleh dukungan lebih banyak dari sumber-sumber kekuatan yang ada, maka dialah yang tampil lebih kuasa. Jadi tarik-ulur atau gesek-menggesek di antara kedua pihak yang berelasi akan terus berlangsung tanpa henti, meskipun para pihak yang terlibat berada dalam wadah kultural Melayu yang sama. Di dalamnya tetap ada dinamika politik, persaingan, kompetisi, kontestasi, konflik dan sebagainya.

Pelukisan Iskandar, Zubir & Zulqoiyim (2010) tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadal) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 memperjelas tesis kontestasi di atas. Sekalipun para kontestan yang berkontestasi dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati sama-sama Orang Padang Pariaman, tetapi ikatan-ikatan lebih kecil dalam masyarakat Kabupaten mewakili kelompok primordial para kontestan itu ikut berkompetisi juga. Peralpnya: "Mereka akan merasa terhina, jika orang kampung mereka dirugikan, dikalahkan ataupun dilecehkan oleh calon yang lain yang tidak ada hubungan primordial itu, sehingga mereka secara tidak masuk akal atau irrasional akan melawan kelompok yang lain yang berada di luar diri mereka". Walapun kami tak sependapat dengan kata irasional¹⁵, tapi fenomena yang diperlihatkan dalam buku tersebut, yaitu kompetisi sesama Orang Pariaman, juga berlaku pada orang Batubara dan Asahan. Sentimen kelompok primordial kedua belah pihak, meski sama-sama Melayu, menggerakkan masing-masing anggotanya untuk bertindak 'membela' dan mementingkan kelompok terkecilnya.

Dalam suasana hubungan antar pihak yang bersitegang karena berbeda kepentingan soal 'pemekaran kabupaten Asahan' dan pembentukan Kabupaten Batubara, maka upaya-upaya kedua belah pihak untuk saling mencari perbedaan-perbedaan atau pertentangan-pertentangan satu sama lain pun semakin subur.

¹⁵ Clifford Geertz memang menyebutkan sentimen-sentimen primordial itu sebagai irasional. Tapi Keumala Chandrakirana, berdasarkan kasus di Sumatera Timur, membantah Geertz. Chandrakirana memperlihatkan bahwa gerakan berdasar sentimen primordial itu juga rasional.

Salah satu di antaranya adalah penggelembungan cerita mengenai asal-usul nenek moyang yang terkait dengan masa-masa kerajaan di masa yang lalu¹⁶. Orang Batubara maupun Orang Asahan sama-sama aktif menggelembungkan cerita yang sebenarnya masih lebih banyak diselimuti oleh misteri atau dongeng ketimbang fakta sejarah. Orang Batubara mengulang-ulang cerita tentang 'kerajaan' yang merupakan konfederasi 5 kerajaan kecil yang berada di bawah naungan Sultan/Kerajaan Siak, dan itu berbeda atau terlepas dari Kesultanan Asahan. Cerita ini dipergunakan sebagai alasan dan argumentasi memisahkan Batubara dari Kabupaten Asahan. Apalagi Kabupaten Asahan pada waktu itu (sebelum pemekaran) adalah Kabupaten yang pusatnya tidak lagi di Tanjung Balai melainkan di Kisaran. Tanjung Balai yang telah menjadi Kota otonom, terpisah dari Kabupaten Asahan sejak tahun 1968, itu masih berkonotasi Melayu ketimbang Kisaran yang walaupun dikenal sebagai Melayu tetapi masih dianggap dekat dengan Batak dan juga Jawa. Sementara Batubara, sekalipun tetap dikenal sebagai Melayu, namun sering-sering diperdengarkan lebih dekat dengan keturunan Minangkabau.

Orang Asahan-Kisaran yang selalu tampil memimpin Kabupaten Asahan, sekalipun ia disebut dan menyebut diri Melayu, selalu atau lebih sering memiliki marga; yang berarti ia sebenarnya adalah keturunan Batak. Legitimasi mito-historis dari klaim ini sangat kuat. Cerita atau dongeng **Kisaran Naga**, misalnya, dengan jelas

¹⁶ Cerita seperti ini juga dilakukan oleh pendukung kampanye Sumba Tengah (Vel 2007).

berisi kisah tentang seekor naga yang ada hubungannya dengan sebuah kerajaan kecil Batak bernama Kerajaan Maria Pane, di Buntu Pane. Kerajaan Maria Pane sendiri dibentuk sekitar 1485, dan dipimpin seorang raja bernama Oppu Tualang, bermarga Sitorus Pane¹⁷.

Cerita tentang Kisaran Naga yang merupakan asal usul nama (toponem) dari kota Kisaran (ibukota Kabupaten Asahan sekarang), itu secara tidak langsung mempertegas garis keturunan atau silsilah Orang Asahan-Kisaran sebagai Batak-Melayu atau Orang Batak jadi Melayu. Cerita Kisaran Naga ini menjadi lebih bermakna dari sekedar cerita rakyat atau dongeng biasa ketika cerita itu semakin sering diperdengarkan kepada khalayak Batubara. Pada masa di mana 'ketegangan' antara kedua kelompok, Batubara dan Asahan, sedang memuncak, cerita semacam ini dapat menjadi sumber energi untuk menambah dan atau mempertahankan semangat khalayak Batubara untuk tetap menuntut pemekaran atau pembentukan Kabupaten Batubara. Dibangun suatu opini bahwa keterpinggiran orang Batubara yang selama ini dirasakan, itu ada kaitannya dengan etnistas atau politik etnisatas, di mana mereka (Orang Asahan yang Batak), lebih memikirkan kesejahteraan dan kemajuan kelompoknya (orang Asahan) sembari meminggirkan orang Batubara yang secara *de jure* adalah bagian dari rakyat/ penduduk Kabupaten Asahan juga. Opini ini lalu dijadikan argumentasi secara tidak tertulis – tetapi sangat kuat daya dorongnya – oleh orang Batubara untuk segera

¹⁷ R. Soetrisman, *Legenda Kisaran Naga* (Yogyakarta: Araska, tt.)

'lepas' dari Asahan dan mendirikan kabupaten sendiri, bernama Kabupaten Batubara.

Data mengenai keberadaan Orang Batak (Toba) di wilayah Asahan sebelum masa penjajahan, memang sangat minim. Barangkali hanya keterangan yang sangat umum dapat dipetik dari apa yang dikemukakan Anthony Reid tentang raja-raja di Sumatera Timur, termasuk Asahan dan Batubara tentunya: "Sesungguhnya dinasti-dinasti Melayu di Sumatera Timur itu adalah keturunan dari campuran darah suku-suku Batak, Minangkabau, Aceh dan unsur-unsur India yang lebih dominan jika dibandingkan dengan kemurnian darah keturunan para sultan di Malaka dan Johor" (Reid 1987). Selain dari keterangan itu, terdapat pernyataan yang sangat umum juga dari Purba & Purba (1998:50) yang berbunyi: "Jauh sebelum kekristenan masuk ke Tapanuli, sudah banyak orang Batak Toba pindah ke daerah Asahan". Kristen masuk ke Tano Batak seperti disepakati oleh HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) adalah pada 1861 atau sekitar 150 tahun yang lalu. Jadi, kalau mengikuti pernyataan Purba & Purba di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa sudah lebih dari 150 tahun yang lalu Orang Batak ada atau masuk ke wilayah Asahan. "Pada umumnya mereka berasal dari Porsea, Lumbanjulu dan daerah Uluan (Habinsaran), daerah-daerah yang berbatasan dengan Asahan", tambah Purba & Purba (1998:50).

Sebelum itu, dalam buku berbeda, Purba & Purba (1997:2) menukikan isi sebuah buku berbahasa Jerman tulisan Franz Junghuhn tahun 1842, yang isinya, katanya, menyebutkan daerah tempat tinggal Orang Batak, itu adalah “seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok-Silindung, Pangaribuan, Siapahutar, Sigotom, daerah Bila dan Kualuh (daerah Asahan-Labuhan Batu)”. Padahal buku si Junghuhn ini, masih menurut Purba & Purba, termasuk buku yang menjadi bahan informasi awal bagi kedatangan misionaris ke Tanah Batak. Jadi, daerah Asahan-Labuhan Batu, sesuai keterangan dalam buku tulisan Junghuhn tersebut, sudah ditempati oleh Orang Batak sebelum penganjil dari Eropa (Belanda dan Jerman) masuk ke Tano Batak.

Purba & Purba (1998:50) mengatakan, masuknya Orang Batak ke Asahan, itu terjadi karena aktivitas perdagangan, yakni Orang Batak Toba datang ke Asahan untuk menukarkan barang-barang yang dibawanya dari kampung halaman dengan barang-barang lain milik orang di daerah setempat (Asahan). Sembari berdagang ada di antara mereka kemudian menjadi pioner atau pembuka daerah baru, sedangkan sebagiannya lagi mendapat kemudahan (memperoleh tanah- pen.) dari penguasa setempat setelah mereka (para pendatang itu) meninggalkan agama-sukunya¹⁸. Daerah baru yang dibuka oleh pendatang Batak Toba, tulis Purba & Purba lebih lanjut berdasarkan hasil wawancaranya dengan informan, adalah kampung Tinggi Raja, Aek Belo dan Sionggal di Kecamatan Buntu

¹⁸ Yang dimaksud ‘agama suku’ dari Orang Batak Toba, kami kira, adalah Ugamo Malim dan orangnya disebut Par Malim. Bacaan lebih lanjut lihat Ibrahim Gultom (2010); dan Uzair Fauzan (2010).

Pane, Asahan. Kampung Tinggi Raja dibuka oleh marga Simatupang sedangkan Aek Belo dan Sionggal dibuka oleh Marga Sitorus. "Marga Simatupang masuk ke Tinggi Raja sekitar tahun 1903, yaitu sebelum kekristenan masuk ke Lumbanjulu. Mereka meninggalkan Lumbanjulu menuju Pasir Mandoge sebagai pedagang, dan di sana menjadi pemeluk agama Islam sebelum pindah ke Tinggi Raja", tambah Purba & Purba.

Selain datang berdagang (Purba & Purba 1998:50-51) tujuan Orang Batak Toba pergi ke Asahan, terutama yang berasal dari Toba Holbung, adalah untuk mencari pekerjaan di Kisaran. Merekalah yang kemudian mendirikan jemaat Kristen Batak di Asahan pada 1 Agustus 1920, dengan anggotanya sebagian bekerja di rumah sakit dan pabrik Bunut.

Purba & Purba lebih lanjut menjelaskan bahwa orang-orang Batak Toba yang datang ke Asahan, dan terutama sekali yang masih memeluk agama suku khususnya sebelum tahun 1920-an mereka itu kemudian memeluk Islam dan menyatakan diri sebagai orang Melayu walupun mereka masih tetap memakai bahasa Batak Toba. Di Tanjung Balai (dulu merupakan ibukota kabupaten Asahan) orang Batak Toba memeluk Islam agar mereka dapat dengan mudah mengadakan kontak dengan suku bangsa lain yang sudah menganut agama Islam. Pelly (1994) berusaha menjelaskan gejala di mana orang Batak tidak menampilkan identitas etnik leluhurnya di wilayah Sumatera Timur (zaman kolonial Belanda) melainkan dengan mengubah atau masuk ke dalam kebudayaan lain yang lebih

dominan, yaitu Melayu-Muslim, ini sebagai strategi adaptasi. Artinya, tindakan mengubah identitas etnik itu ada kaitannya dengan upaya kelompok bersangkutan untuk menjamin kelangsungan kehidupan ekonomi, yang pada masa itu sumberdaya ekonomi dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan perkebunan yang mendapat konsesi tanah dari Kesultanan Melayu.

Pelly (1994:60) menyatakan:

Ketika ekspansi perkebunan-perkebunan menyita hampir semua lahan subur di dataran, perkebunan-perkebunan tersebut memberikan tanah *jaluran* kepada suku Melayu guna ditanami. Tanah *jaluran* adalah kebun-kebun tembakau yang baru saja dipanen, yang karena adanya sistem rotasi yang dipakai oleh perkebunan, tidak akan ditanami tembakau lagi selama 8 tahun. Tanah-tanah tersebut sudah terolah dengan baik dan masih mengandung sisa-sisa pupuk dari bekas tanaman tembakau. Yang boleh menggunakan jaluran adalah suku Melayu, karena tanah dianggap sebagai tanah adat Melayu. Proses Melayunisasi bermula dari kebijakan ini. Para perantau dari Karo, Simalungun dan pedesaan Mandailing yang ingin bertani harus menjadi Melayu secara budaya; orang-orang ini dikenal dengan Melayu Dusun. Walau atribut-atribut religious dan etnik itu terpisah, Kesultanan-Kesultanan Melayu dan rakyatnya merasa bahwa budaya mereka pada dasarnya adalah Islam; karena itu, seorang yang tidak beragama Islam tidak bisa menjadi Melayu”.

Jadi ada semacam tekanan struktural yang terpaksa diterima oleh orang-orang dari suku Non-Melayu, seperti Batak misalnya, demi kelangsungan hidup atau ekonomi mereka di wilayah Sumatera Timur zaman kolonial Belanda. Dengan masuk Melayu orang berhak mendapat tanah adat. Tanah adat ini bias diwariskan kepada anak-

anak mereka. "Ini meneraik perantau untuk menjadi Melayu", tegas Pelly.

Selain sangat dekat secara geneologis dengan Batak, wilayah Asahan juga dihuni sebagian besar oleh orang Jawa. Ketika isu pemekaran Asahan merebak, populasi suku Jawa di Asahan diperkirakan sebanyak 60 %, Batak 14 %, Melayu 12 %, lain-lain 24 %. Orang Jawa berpotensi besar untuk lebih dominan dibandingkan Batak-Melayu yang selama ini hampir selalu tampil sebagai pemimpin pemerintahan dan birokrasi. Dengan model PILKADA dewasa ini, peluang anggota masyarakat dari kalangan penduduk berpopulasi besar, seperti Jawa, sangat besar peluangnya untuk tampil sebagai pemimpin. Sebagai contoh dapat disebutkan mantan walikota Kota Tanjung Balai, dr.H. Soetrisno Hadi, SpOG, periode 2006-2011, adalah Putra Jawa kelahiran Sumatera (Pujakesuma). Berikut daftar Bupati Kabupaten Asahan:

Tabel 1

DAFTAR NAMA DAN PERIODE BUPATI KABUPATEN ASAHAN

NO	NAMA	PERIODE
1.	Abdullah Eteng	15 Maret 1946 – 30 Jan 1954
2.	Rakutta Sembiring	1 Jan 1954 – 29 Feb 1960
3.	Abdul Azis	1 Maret 1960 – 3 Mei 1960
4.	Usman YS	3 Mei 1960 – 10 Mei 1966
5.	H.A. Manan Simatupang	11 Mei 1966 - 1974
6.	Ibrahim Gani	1 Feb 1974 – 2 Maret 1979
7.	Dr. Bahmid Muhammad	2 Maret 1979 – 2 Maret 1984
8.	H. A. Rasyid nasution	2 Maret 1984 – 17 Maret 1984
9.	Abdul Wahab Dalimunte	17 Maret 1984 – 22 Juni 1984
10.	Zulfirman Siregar	22 Juni 1984 – 22 Juni 1989
11.	H.R. Sihotang I	22 Juni 1989 – 22 Juni 1994
12.	H. R. Sihotang II	22 Juni 1994 – 22 Juni 1999

13.	Risuddin	2000 – 2005
14	Risuddin	2005 – 2010
15.	Taufan Gama Simaatupang	2010 – 2015

Sumber: 52 Tahun Kabupaten Asahan dan wawancara dengan R. Soetrisman.

Dari nama-nama Bupati Asahan tertera di atas, hanya satu nama yang teridentifikasi sebagai orang Batubara, yaitu Usman YS (periode 1960-1966). Selepas itu orang Batubara tidak pernah muncul lagi. Ini merupakan indikasi bahwa orang Batubara yang selama ini lebih kuat mengusung isu Melayu, dalam arti non-Batak, memang lebih tidak punya akses ketimbang orang Asahan yang Batak-Melayu. Mereka yang berasal dari “wilayah pemerintahan datuk-datuk” sebutan lain untuk wilayah Batubara kurang mendapat kesempatan untuk berkiprah di kancah politik dan birokrasi Kabupaten Asahan. Ini berimplikasi kepada pembangunan fisik, kesejahteraan masyarakat dan wilayah Batubara karena kendali pembangunan sejak dari dulu hingga sekarang selalu berada pada pemerintah, atau orang-orang penting yang memegang jabatan tertentu di pemerintahan.

III. Negara dan Politik Etnik

Ketika kendali pembangunan benar-benar terpusat pada pemerintah¹⁹, dan diikuti kemudian oleh semakin lemahnya semangat kegotongroyongan yang (konon dulunya) berpusat pada rakyat²⁰, maka peranan orang-orang yang 'duduk' sebagai elit pemerintahan menjadi sangat besar dalam pembangunan. Orang mana dia? Bagaimana wawasannya, itu sangat menentukan. Ini terjadi karena selain primordialisme hal ini kita sudah bahas di bagian terdahulu juga ada 'politik etnisitas' (*politics of ethnicity*). Primordialisme membuat orang-orang yang duduk di pemerintahan (penentu kebijakan) lebih mementingkan pembangunan di wilayah primordial-nya, entah itu desanya, daerahnya, kelompoknya dan lain-lain ikatan yang dekat padanya. Sementara politik etnisitas mengarah pada penggunaan identitas etnik untuk meraih posisi dan kedudukan dalam pemerintahan/ negara.

¹⁹ Ketika *top down planning* mulai diaplikasi oleh pemerintah Orde Baru, kendali pembangunan sebenarnya sudah berada di tangan pemerintah. Pemerintah bukan saja merencanakan sendiri apa yang mau dikerjakannya untuk masyarakat, tetapi juga melaksanakan sendiri pembangunan yang direncanakannya itu. Peran masyarakat sedikit demi sedikit semakin meminggir. Swadaya masyarakat semakin mengecil dan lambat laun menghilang, digantikan oleh pembiayaan yang bersumber dari luar.

²⁰ Lihat misalnya pemahaman Bung Karno tentang gotongroyong, tepatnya negara gotongroyong, seperti dia pernah katakan dalam pidato di hadapan rapat BPUPKI 1 Juni 1945 mengenai Negara Indonesia yang akan dibentuk (Amri Marzali 2005).

Seperti diketahui, baik dalam konteks negara industri maju maupun dalam konteks negara sedang berkembang, semua negara (paska perang dunia II) telah menjadi "*arbiter* langsung dan krusial bagi kesejahteraan ekonomi, dan juga bagi status politik serta apapun yang mengalir dari negara", kutip Tambiah (1994:436) dari Glazer dan Moynihan. Oleh sebab itu penguasaan oleh kelompok (etnik) atas birokrasi atau pemerintahan suatu negara menjadi sangat penting bagi kesejahteraan kelompok (etnik) bersangkutan²¹. Sebab dengan menjalankan penguasaan atas negara/pemerintahan, maka dari situlah kelompok etnik bersangkutan mengadakan '*affirmative actions*' atau menjalankan penyaluran distribusi '*pork-barrel*' kepada anggota-anggotanya. Politisasi etnisitas dalam hal ini menjadi pilihan yang strategis.

Kelompok masyarakat Batubara yang merasa terpinggirkan oleh kelompok Asahan kelompok yang menguasai pemerintahan dan birokrasi Kabupaten Asahan pun akhirnya memilih jalur politisasi etnisitas²² untuk memperjuangkan 'pemisahan diri' mendirikan

²¹ Tambiah (1994:437) berkata apa yang dicita-citakan dalam konstitusi tentang *representative government* yang bergantung pada '*individual rights of citizens*' dan keinginan kuat warga yang '*one-man-one vote*' untuk membentuk partai-partai atas dasar kepentingan kompetitif, itu tidak mendatangkan hasil yang diharapkan. Sebagai gantinya, kolektivitas yang bernama kelompok etnik lah yang menjadi aktor-aktor politik; yang mencari tindakan afirmatif untuk achievement atau restorasi keistimewaan-keistimewaan dan kesempatan-kesempatan atas nama kesetaraan etnik/ rasial.

²² Ada juga pendapat yang mengatakan politisasi etnisitas terjadi karena partai politik yang berbasis etnik tidak ada sehingga kolektivitas etnik-lah yang dimanfaatkan. "***Lacking a political party infrastructure, an ethnic ideology of indigeneity became their best weapon in the struggle to carve out a bureaucratic niche for themselves***", tulis Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (2007:20) dalam pengantarnya atas artikel Myrna Eindhoven mengenai pemekaran Kepulauan Mentawai dari Kabupaten Padang Pariaman.

Kabupaten Batubara. Mereka mendirikan kelompok-kelompok yang dinamakan GEMKARA di setiap kecamatan yang menurut sejarah²³ dan budaya merupakan wilayah Batubara. Adapun kecamatan-kecamatan dimaksud adalah: Kecamatan Tanjung Tiram (luas wilayah 17.379 ha); Kecamatan Sei Balai (luas wilayah 10.988 ha; Kecamatan Talawi (luas wilayah 8.980 ha); Kecamatan Lima Puluh (luas wilayah 23.955 ha; Kecamatan Air Putih (luas wilayah 7.224 ha); Kecamatan Sei Suka (luas wilayah 17.147 ha); dan Kecamatan Medang Deras (luas wilayah 6.547 ha). Solidaritas sosial ke-Batubara-an mereka digugah atau dimainkan untuk membakar semangat rakyat/ masyarakat memaksa pemerintah setempat melakukan pemekaran kabupaten Asahan menjadi Asahan dan Batubara. Politik etnisitas, seperti dikatakan Tambiah (1994) bermula dari kesadaran akan identitas ini: Orang Batubara versus Orang Asahan. Orang Batubara berbeda dengan Orang Asahan. Meskipun sama-sama mengaku Melayu, tetapi merasa ada perbedaan; perbedaan asal-usul, perbedaan pengalaman (sejarah) pemerintahan baik dengan kerajaan Siak maupun sewaktu di bawah penjajahan Belanda. Kesadaran tentang perbedaan inilah yang dikedepankan dalam berjuang; termasuk beda nasib atau peruntungan dalam konteks politik dan ekonomi selama bergabung di bawah "bendera" Kabupaten Asahan.

²³ Sejarah juga dijadikan argumentasi khusus oleh para elite lokal di Sumba Tengah dalam kampanye pembentukan Kabupaten Sumba Tengah yang masih tertunda. Lihat Jacqueline Vel (2007), "*Campaigning for a New District in West Sumba*", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, ed, *Renegotiating*

Seperti diketahui, salah satu syarat untuk pemekaran di daerah mana pun, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada masa itu²⁴, adalah adanya surat rekomendasi dari Bupati; dalam hal ini Bupati Kabupaten Asahan. Bupati Asahan harus terlebih dahulu mengeluarkan Surat yang isinya merekomendasikan pembentukan kabupaten Batubara dari induknya Kabupaten Asahan. Ini adalah persyaratan. Dasar pertimbangan Bupati mengeluarkan rekomendasi antara lain persetujuan DPRD Asahan. DPRD harus lebih awal lagi mengeluarkan surat persetujuan pemekaran; tentu berdasarkan hasil sidang pleno dewan yang dimohonkan oleh anggota masyarakat selaku pemrakarsa pemekaran. Ternyata, untuk mendapatkan persyaratan-persyaratan administratif ini tidak mudah. Kelompok pemrakarsa pemekaran atau pembentukan Kabupaten Batubara harus kerja keras dan menunggu cukup lama, setelah melalui berbagai peristiwa yang beberapa di antaranya sempat meninggalkan trauma.

Boundaries Local Politic in Post-Soeharto Indonesia (Leiden: KITLV Press 2007), hal., 104-119.

²⁴ Lihat aturan yang berlaku masa itu yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah, pasal 16 ayat 1 a: ada kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan. Kemauan politik dari Pemerintah Daerah inilah yang dimaknai dengan 'rekomendasi Bupati' yang justeru Bupati tidak setuju pemekaran.

Faktor primordial bupati yang orang Asahan dan anggota Dewan yang juga kebanyakan Asahan, ikut menghalang-halangi langkah orang Batubara untuk mendirikan kabupaten Batubara²⁵. DPRD dan Bupati mengeluarkan PERDA tentang PROPEDA sebagai instrumen hukum yang dianggap sah untuk dikedepankan, sekalipun maksud sebenarnya (politik) adalah menyangkal keinginan orang Batubara untuk memekarkan Asahan atau mendirikan kabupaten Batubara. Dengan berpegang pada Perda inilah kemudian Pemerintah Daerah Asahan menolak tuntutan orang Batubara untuk pemekaran dan bahkan sekaligus menganggap tuntutan pemekaran tersebut tidak sah. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain, orientasi perjuangan kelompok pro-pemekaran berubah dan memusatkan energi yang lebih keras untuk menggugat keabsahan Perda di dalam konstalasi perundang-undangan Indonesia, yang menurut kelompok pro-pemekaran bahwa Perda tersebut bertentangan dengan Undang- Undang yang kedudukannya dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia lebih tinggi dari pada Perda.

Memainkan peluang dan atau kelemahan perundang-undangan yang ada dalam pertarungan politik para pelaku (stakeholder), menurut hemat kami, termasuk dalam kategori membangun budaya politik (*political culture*) anti-kekerasan fisik. Elit

²⁵ Bandingkan dengan pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat yang dimekarkan dari Kabupaten Dairi tahun 2003. Pemekaran Dairi berjalan sangat mulus antara lain karena Bupati Dairi saat itu, yaitu M.P. Tumanggor, adalah orang Pakpak dari suak Kelasien; bukan orang Batak Toba (Lihat Zuska & Agustrisno 2010: 59).

intelektual ke dua belah pihak, dengan demikian, mengadu kemampuan dan kekuatannya masing-masing lewat jalur dan mekanisme yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pihak yang merasa dirugikan kelompok yang dirugikan dalam konteks ini adalah kelompok Orang Batubara yang pro-pemekaran— mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk membatalkan Perda yang dianggapnya bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Selain rekomendasi Bupati tentu ada proses politik di DPRD setempat yang mana proses itu nanti akan bermuara pada adanya Surat Persetujuan untuk dilakukannya pemekaran. Gerakan masyarakat sangat penting dalam hal mendesak DPRD melakukan sidang untuk membahas isu pemekaran yang diinginkan oleh masyarakat²⁶. Orang Batubara yang pro-pemekaran menggunakan teknik pengerahan massa, seperti yang akan dilakukannya (tetapi dibatalkan tiba-tiba) pada hari Sidang Paripurna DPRD Asahan 21 Oktober 2002. Akan tetapi kenyataannya tidak mudah karena; (1) Wakil rakyat yang duduk di DPRD Asahan saat itu belum seluruhnya setuju dengan pemekaran, walaupun jumlah mereka yang setuju semakin bertambah; dan (2) Adanya demonstrasi tandingan dari masyarakat Asahan yang menentang pemekaran, dan telah

²⁶ Kami yakin penggunaan 'massa' untuk mempengaruhi atau mendesak sebuah lembaga negara mengeluarkan keputusan, itu merupakan cara yang sudah luas digunakan oleh masyarakat Indonesia—karena proses difusi unsur-unsur kebudayaan politik— terutama setelah Indonesia memasuki masa 'reformasi'. Media massa dan kebebasan mengeluarkan pendapat, kami kira, adalah sebagai dua kondisi yang sangat besar perannya dalam hal ini.

dipersiapkan sejak tanggal 20 Oktober 2002. Menurut berita koran, aksi masyarakat ini digerakkan oleh Bupati, seperti dalam judul berita berikut: **“Camat diperintahkan Pimpin aksi anti Batubara, Hari ini, Bupati Asahan Mobilisasi Massa Hempang Sidang Paripurna DPRD”** (Medan Pos, 21 Oktober 2002).

IV. Money Politics dan Kekerasan

Demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok anti pemekaran ini bertujuan menghempang Sidang Paripurna DPRD yang salah satu agendanya diperkirakan akan membahas usul pemekaran yang diajukan oleh BP3KB (Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Kabupaten Batubara) mewakili masyarakat Batubara. Oleh karena tujuan “demonstrasi” ini adalah menghempang atau mencegah agar Sidang Paripurna tidak dapat dilaksanakan, maka tidak tertutup kemungkinan mereka melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat anggota DPRD, terutama yang pro-pemekaran, untuk tidak menghadiri Sidang Paripurna keesokan harinya. Tindakan ini dimainkan oleh pemuda-pemuda yang direkrut dari organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK).

Menurut sebagian anggota dewan yang setuju pemekaran dan sekaligus merasa menjadi korban dari tindakan di atas, tindakan masa tandingan anti pemekaran itu adalah teror dan intimidasi. Hal ini mereka tuangkan dalam sebuah catatan yang ditandatangani oleh 14 orang anggota dewan, dengan tajuk: **KRONOLOGI AKSI, TEROR**

DAN INTIMIDASI MASYARAKAT KONTRA PEMBENTUKAN BATUBARA PADA TANGGAL 20-21 OKTOBER 2002”.

Isi ringkas dari catatan ini adalah sebagai berikut.

Pada pukul 22.00 WIB, tanggal 20 Oktober 2002, konsentrasi massa terbentuk di Universitas Asahan, Kisaran. Mereka adalah kelompok kontra pemekaran yang dimobilisasi oleh Camat dan Asisten Pemerintahan, mengingat besok hari (21 Oktober 2002) masyarakat Batubara akan menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD saat anggotanya melaksanakan sidang paripurna.

Selain di Universitas Asahan (UNA), kesibukan di luar kebiasaan juga terjadi di seluruh sekretariat Organisasi Kepemudaan terutama Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya.

Pada pukul 02.30 WIB dinihari 21 Oktober 2002, Syahrial Sitorus, anggota DPRD Kabupaten Asahan, menyampaikan kepada rekannya sesama anggota DPRD Asahan Drs. Bustami HS, bahwa kediamannya di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kisaran Barat telah dirusak oleh sekelompok orang yang selalu berteriak dan menghujat serta mengutuk tindakan anggota DPRD Kabupaten Asahan yang telah mendukung pembentukan Kabupaten Batubara. Laporan kepada kepolisian via telepon telah dilakukan oleh Syahrial Sitorus pada saat kejadian Syahrial Sitorus masih berada di Pematang Siantar namun sampai pagi polisi tidak hadir ke Tempat Kejadian Perkara.

Pukul 09.00 WIB massa yang terkonsentrasi di UNA dan di tempat-tempat lain meluncur ke kantor DPRD Kabupaten Asahan. Kemudian satu unit pick-up meluncur ke kantor DPC PPP guna mencari anggota DPRD dari PPP yang mendukung pemekaran, yaitu: Amir Hamzah Samosir, Drs. Bustami HS, Nurmansyah SE, Syahrial Sitorus, dan Muhammad Yusuf A. Nondok. Karena yang dicari tidak ditemukan, pick-up yang sama meluncur ke kediaman Drs. Bustami HS guna melakukan aksi teror dan intimidasi. Dari baju seragam pelakunya dikenali mereka berasal dari organisasi IPK, PP, SPSI, PPM Garda Banper, FKPII termasuk Zasnis Sulungs dan Abu Bakar Nasution.

Belajar dari gerakan-gerakan masyarakat yang ditampilkan oleh para pihak dalam proses pemekaran kabupaten Asahan yang berakibat pada pembentukan Kabupaten Batubara, ini banyak terungkap unsur-unsur yang sebenarnya merupakan bagian dari budaya politik (*political culture*) bangsa Indonesia paska rejim otoriter. Selain politik etnisitas yang telah kita bicarakan, politik di Indonesia ini juga tidak jarang menggunakan teror dan intimidasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Orang-orang politik bisa mengerahkan orang-orang atau kelompok orang untuk maksud tersebut dengan melakukan kekerasan. Orang itu bisa merupakan sebuah organisasi, perkumpulan dan lain-lain yang pada asas atau tujuan organisasinya tidak/bukan dimaksudkan sebagai alat untuk menekan, menakut-nakuti, atau mengancam pihak lain. Namun dalam kenyataannya, organisasi-organisasi tersebut dapat 'dikerahkan' untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjurus teror atau intimidasi.

Peristiwa yang menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asahan di atas, memberi bukti bahwa 'organisasi-organisasi' kepemudaan sekalipun, sesungguhnya dapat dimanfaatkan, dimobilisasi, dan digunakan oleh orang-orang politik untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Pengerahan massa dari organisasi pemuda macam ini, seperti lazim diungkap dalam percakapan sehari-hari, itu sering terkait dengan uang; bayaran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak reformasi, massa demonstran dapat disewa, dikumpulkan, lalu dikerahkan untuk memekikkan yel-yel tertentu sesuai dengan pesanan pihak yang menyewa atau membiayai demonstrasi itu. Media massa sudah

sering kali mengungkap demonstrasi-demonstrasi yang digerakkan oleh uang. Berikut sebuah ilustrasi dari kutipan tentang 'demonstrasi bayaran' di Jakarta:

Saya pernah meliput puluhan demo di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Mulai dari demo yang diikuti segelintir orang hingga ribuan peserta, dari yang damai hingga bentrok berdarah dengan petugas Kepolisian, serta dari yang sungguh-sungguh hingga meragukan.

.....Bagaimana mengenali 'jenis kelamin' demo bayaran tersebut?

Pertama, peserta. Mereka umumnya tidak tahu apa tema demo, apa masalah yang sedang mereka perjuangkan.....Kedua, atribut. Banyak peserta demo mengaku dari kelompok mahasiswa dan memakai jaket almamater sebuah universitas. Namun, setelah dicermati lebih dekat, kampus mereka tercurigai fiktif. Ketiga, organisasi yang dipakai. Senada dengan atribut, organisasi pendemo kadang tidak terkenal, tidak jelas nama dan riwayat pembentukannya. Keempat, orator.

Tidak cuma peserta saja yang merupakan massa pesanan, tukang orasi atau arator pun demikian. Dalam berbagai macam demonstrasi, ada beberapa oratornya yang itu-itu melulu. Sang orator memang terlihat mahir berorasi, suaranya lantang, kendati isinya tidak bermutu dan tidak banyak berbeda.

Kelima, anarkis. Demo-demo bayaran biasanya suka mencari simpati agar dilihat dan diliput oleh media massa. Karena eksistensi mereka dipandang sebelah mata serta tema demo yang tak menarik, mereka akan mencari perhatian dengan berbuat anarkis. Untuk itu, biasanya ada satu oknum pendemo yang bertugas memancing atau memanas-manasi suasana, entah itu mengolok-olok atau dengan melemparkan sesuatu ke arah petugas²⁷.

²⁷ Sumber: <http://kageri.blogdetik.com/2010/01/14/mengenali-demo-bayaran/>

Fenomena demonstrasi bayaran ini betul-betul menunjukkan betapa uang, dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, dapat digunakan untuk melunturkan segala idealisme²⁸; menggerakkan orang-orang yang diam, mendiamkan orang-orang yang bergerak. Uang adalah power karena ia, sama seperti power. Power bisa mengubah pikiran dan tindakan individu (Grillo 2005). Oleh sebab itu, orang yang memiliki uang, atau orang yang bisa mengendalikan uang, dia adalah orang yang powerful. Dia bisa menyuruh orang untuk berdemonstrasi menyuarakan tuntutan yang seolah-olah datang dari masyarakat; dan ia juga bisa menyuruh orang atau sekelompok orang untuk melakukan kekerasan guna melumpuhkan kekuatan atau pertahanan lawan. Semuanya ini dilakukan dengan uang.

Cara-cara seperti yang diperlihatkan oleh para pemuda tadi dalam demonstrasi menolak pemekaran Asahan, itu menular atau menjaral (diffusi) ke segala penjuru tanah air, dalam era telekomunikasi yang sudah sangat masif dewasa ini. Apa yang terjadi di Jakarta, misalnya, dalam sekejap, dapat dilihat dan kemudian ditiru oleh orang-orang yang tinggal di daerah di seluruh Indonesia. Jikalau di Jakarta sebagian pemuda telah menjadikan 'demonstrasi' sebagai mata pencaharian atau sumber penghasilan sampingan, maka tidak mustahil, dalam waktu yang singkat saja,

²⁸ Idealisme sering kali dianggap ada pada dan sekaligus menjadi sifat dari para pemuda. Pemuda dianggap tidak mudah larut oleh pengaruh kepentingan-kepentingan praktis jangka pendek, materi, yang seringkali tidak mengindahkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh etika/moral. Selain itu juga terkandung pada diri pemuda sifat jujur, berani, cerdas, dan siap menderita demi menggapai cita-cita yang luhur (Disarikan oleh penulis dari beberapa sumber bacaan).

fenomena serupa akan muncul pula di daerah-daerah lain termasuk Asahan dan Batubara. Teknologi komunikasi (televisi, internet dan lainnya) ditambah keadaan sosial-ekonomi massa pemuda terpelajar yang kurang menguntungkan, itu semua akan memfasilitasi dan mempermudah konsep 'demonstrasi bayaran' tersebut menyebar (berdifusi) dan tumbuh dalam praktik perpolitikan di masyarakat.

Uang, tepatnya politik uang (*money politic*), memang menjadi ciri penting, bukan saja dalam kontestasi kekuasaan seperti dikemukakan Hadiz (2010:121), tetapi juga dalam pemekaran. Vel (2007:119) mencatat, dari hasil penelitiannya atas kampanye pembentukan Sumba Tengah, sebagai berikut:

The fact that Central Sumba has not yet succeeded in becoming a district by itself does not contradict the opinion that all government decisions in Indonesia are for sale, but it could be interpreted as a sign that a district has a minimum price, which is too high for poor and small areas like Central Sumba to pay.

"Kemampuan membayar", dengan demikian, menjadi sangat penting dalam proses suatu kelompok masyarakat mendapatkan suatu 'keputusan pemerintah' yang statusnya selalu atau semuanya diperlakukan sebagai '*for sale*', termasuk dalam hal pemekaran daerah. Artinya, apabila sesuatu wilayah ingin mekar atau memisahkan diri, maka orang-orang di balik keinginan mekar tersebut, harus juga memiliki kemampuan menyediakan uang untuk membayar keputusan-keputusan yang diperlukannya dari berbagai institusi yang dipersyaratkan. Apabila mereka tidak mampu membayar atau menyediakan uang dalam jumlah yang cukup besar besar di sini tidak ada standar yang pasti maka tuntutan atau

keinginan untuk mekar, itu akan sulit terwujud. Batubara, termasuk salah satu wilayah yang para pendukungnya adalah orang-orang dari golongan yang tidak terlalu kuat dalam penyediaan uang. Kebanyakan mereka adalah para pemuda yang sangat getol menuntut pemekaran karena suatu harapan seperti yang dinyatakan oleh Vel (2007):

These are supported by a large group of well-educated, unemployed youths, who do not want to work in agriculture. These youths see the new district as an opportunity to get the jobs they hoped and studied for. In the short term the campaigning itself provides them with lots of excitement, which is otherwise hard to get in Sumba. They are very vocal and could become more powerful in their capacity to use violence and enforce social exclusion for political opponents.

Kasus Batubara sangat jelas memperlihatkan ciri-ciri semacam ini. GEMKARA yang bermetamorfosa menjadi Gerakan Masyarakat Untuk Pemekaran Batubara, itu sebelumnya berasal dari generasi muda yang menyatukan diri dalam Generasi Muda Kabupaten Batubara. Mereka adalah orang-orang muda terdidik yang tinggal di perantauan, di mana sebagian dari mereka masih terombang-ambing mencari pekerjaan yang lebih pasti. Pegawai Negeri Sipil termasuk cita-cita yang sangat diidam-idamkan oleh mereka, seperti harapan dari kebanyakan para pencari kerja dewasa ini. Dengan pemekaran alias pembentukan Kabupaten Batubara, lapangan pekerjaan, khususnya Pegawai Negeri Sipil akan terbuka bagi para pemuda lokal. Berikut salah satu respons pemuda Batubara atas Penerimaan PNS tahun 2008.

"rizza on November 20th, 2009 22:25

pak .buk yg duduk di batu bara msh bnyak tamatan2 nak batu bara yg blum mendapatkan pekerjaan yg layak.tolong kmi anak bpk dn ibuk berkat kmi jua lah bpk ibu di sana tolong kami putra putri daerah .agar kmi dpt menatap ke idupan yg lebh baik"²⁹

Mengharapkan terbukanya lapangan pekerjaan sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) setelah suatu proses pembentukan kabupaten selesai, oleh para pemuda terutama para pemuda pendukung dan pelopor pemekaran tentu sangat wajar karena setiap ada pemekaran selalu ada pembentukan organisasi pemerintahan dan pengisian personalia organisasi pemerintahan. Dalam situasi di mana lapangan pekerjaan di masyarakat sangat sempit karena perusahaan atau lapangan usaha tidak bertumbuh dengan baik lapangan PNS menjadi satu-satunya tumpuan harapan. Oleh sebab itu para pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukan atau memutuskan penerimaan PNS menjadi sangat penting kedudukannya.

Proses penerimaan PNS di lingkungan pemerintah kabupaten pemekaran, termasuk Kabupaen Batubara, tidak pernah sepi dari isu KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Uang memegang peranan sangat penting. Yang memilik banyak uang, itulah yang mampu membayar, dan dialah yang diterima dalam seleksi. Oleh sebab itu, setiap suatu kabupaten pemekaran merekrut calon-calon

²⁹ Lihat <http://bersamatoba.com/tobasa/lowongan-kerja/penerimaan-cpns-pemerintah-kabupaten-batu-bara-pada-november-2008.html>

PNS, terjadilah konflik antara pemuda yang sebelumnya mendukung pemekaran secara idealis dengan aparat pemerintah yang merekrut pemuda berdasarkan kemampuannya menyediakan uang untuk “masuk” PNS. Kabupaten Batubara sempat mengalami cekcok di antara aparat pemerintah dengan elit masyarakat pendukung pembentukan Kabupaten Batubara, gara-gara isu ‘pemuda setempat’ dan ‘uang’. Elit masyarakat pendukung pembentukan Kabupaten Batubara mengingingkan agar pemerintah mengutamakan pemuda setempat atau putra daerah dalam penerimaan PNS. Namun, nyatanya, penerimaan PNS diwarnai oleh isu ‘masuk bayar’; isu yang pada gilirannya nanti akan menelantarkan putra daerah karena pemuda yang masuk/ diterima, itu tergantung pada kemampuan dia membayar, tidak peduli dari mana pun mereka berasal.

BAB V

P E N U T U P

Penelitian ini berhasil menemukan budaya politik (*political culture*) yang bekerja pada saat proses pemekaran Kabupaten Asahan atau, dengan kata lain, pendirian Kabupaten Batubara, masih berjalan. Walaupun proses pemekaran atau pembentukan kabupaten pemekaran ini secara formal baru dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, oleh Pemerintah Indonesia, namun upaya orang Batubara untuk memisahkan diri dari Kabupaten Asahan, itu sudah berlangsung sejak lama. Upaya-upaya yang dilakukan untuk itu semuanya gagal karena, secara formal, upaya dimaksud tidak didukung perundang-undangan yang ada. Lagi pula, harus diakui, bahwa selama pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998) boleh dibilang, pemekaran wilayah-wilayah pemerintahan di daerah tidak mendapat respon sedikit pun dari pemerintah pusat. Sentralisasi kekuasaan pada saat itu sangat kuat cengkramannya atas daerah-daerah, sehingga semua daerah menjadi lemah dan tidak berdaya untuk menggerakkan roda pemekaran.

Dalam pada itu, keinginan orang Batubara untuk “lepas” secara administrasi pemerintahan (pemekaran) dari Kabupaten Asahan, atau dengan kata lain membentuk Kabupaten Batubara, sesungguhnya tidak pernah padam. Oleh sebab itu, ketika Undang-Undang No. 22/1999 diberlakukan pada tahun 2001 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, di banyak daerah tingkat dua di Indonesia

ketika itu, termasuk di Kabupaten Asahan, tepatnya di wilayah tradisional Batubara, secepat kilat UU tersebut mendapat respons positif; mengingat hal itu akan memberi jalan kepada mereka untuk meneruskan cita-cita pendahulu mereka untuk 'pisah' dari Kabupaten Asahan. Buktinya, pada tahun 2001, saat UU No.22/1999 resmi diberlakukan, orang Batubara melalui Gemkara/ BP3KB dengan cepat menyelesaikan studi semacam studi kelayakan guna melengkapi persyaratan mengusulkan pemekaran atau pembentukan Kabupaten Batubara.

Para pihak yang paling berkepentingan dengan pemekaran, kalau dilihat dari personalia tokoh penggerakannya, dapat dikatakan bahwa sebagian terbesar dari mereka adalah perantau; orang-orang Batubara yang tinggal atau hidup menetap di perantauan, terutama sekali, perantau Batubara di Kota Medan. Mereka umumnya kalangan terpelajar, dan sebagian telah bekerja dengan mapan di berbagai lapangan, termasuk di lapangan pendidikan, hukum, Pegawai Negeri Sipil, swasta dan lain-lain. Sebagian lagi merupakan kalangan muda terpelajar, mahasiswa atau mantan mahasiswa, yang belum memiliki pekerjaan yang mapan. Kalangan terpelajar, muda, sebagian mapan dan kelas menengah inilah yang tampil sebagai penggerak utama gerakan pembentukan Kabupaten Batubara³⁰, yang diketahui, pasti membutuhkan biaya yang relatif besar.

³⁰ Fakta ini relatif sama dengan kejadian di Sumba, seperti dikemukakan oleh Vel (2007: 105): *"The case of Sumba presented here is an example of how new laws and institutions created at the national level are taken as opportunities by members of the local elite, who adjust them to local political culture and use them to strengthen their positions or interests"*.

Seperti dikatakan oleh Vel (2007:104): *“Throughout Indonesia, the campaigning rhetoric always mentions three main reasons for creating a new district: it brings the government closer to the people, it will be beneficial to economic prosperity, and it is the wish of the people to have their own district”*. Namun dalam kenyataannya, berbeda dari yang dikampanyekan, gerakan pemekaran itu sebenarnya lebih kental membawa isu politik. Pemekaran digunakan untuk memenangi atau menyelesaikan suatu kontestasi panjang yang berlangsung antara kelompok-kelompok primordial tertentu. Primordialitas, dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari pemekaran.

Ketidakadilan yang dirasakan oleh satu kelompok primordial tertentu, seperti adanya pembatasan atau keterbatasan akses terhadap sumberdaya ekonomi, itu memicu dilancarkannya kampanye pemekaran. Orang Batubara merasakan hal ini sejak lama, yaitu semenjak mereka dipersatukan dalam satu kabupaten bersama dengan Asahan. Sejak itu orang Batubara merasa selalu tersisihkan, hampir dalam segala lapangan kehidupan bersama, hanya lantaran kendali pemerintahan lebih banyak dipegang oleh Orang Asahan. Program-program pembangunan, serta bantuan-bantuan lain dari negara kepada masyarakat, itu lebih banyak disalurkan kepada masyarakat atau orang yang berdomisili di wilayah Asahan.

Proses pembentukan Kabupaten Batubara dari pemekaran Kabupaten Asahan tidak bisa dikatakan berjalan mulus. Kurang lebih lima tahun lamanya sejak pertama kali diusulkan, baru terealisasi. Tidak sedikit tenaga, biaya dan waktu serta 'perang wacana' yang dibelanjakan, bahkan tidak ketinggalan melibatkan tindakan-tindakan kekerasan. Pengerahan orang atau massa dengan cara 'bayaran' juga terjadi dalam proses ini. Bahkan tindak kekerasan pun terjadi, sehingga menimbulkan kerugian di antaranya kerugian materi dan sosial-psikologi.

Kalau anggapan umum mengatakan perlu adanya uang untuk mendapatkan suatu keputusan pemerintah, maka dalam hal pemekaran Kabupaten Asahan ini, anggapan itu tidak benar. Lambatnya keputusan pemerintah keluar untuk menyetujui pemekaran, itu tidak lain karena Bupati Asahan tidak mau mengeluarkan rekomendasi pemekaran. Tidak ada indikasi melambatkan keluarnya rekomendasi karena ia (Bupati) tidak diberi uang, tetapi betul-betul karena Bupati tidak bersedia atau tidak setuju dengan pemekaran. Dikeluarkannya Perda oleh DPRD Asahan tentang Propeda yang berisi (secara tidak langsung) larangan melakukan pemekaran, adalah tindakan politik Bupati dengan cara meminjam 'tangan' DPRD, menolak kampanye pemekaran.

Sikap keras dan ketidaksetujuan Bupati pada pemekaran Asahan juga diperlihatkannya melalui cara lain. Ia, sesuai informasi yang ada, turut mengerahkan kelompok-kelompok tertentu mengadakan demonstrasi dengan isu menolak pemekaran. Tidak cukup hanya dengan demonstrasi damai, demonstran yang berasal dari organisasi-organisasi kepemudaan, justru melakukan kekerasan terhadap para anggota DPRD Asahan yang kemudian, setelah bertarung sekian lama, akhirnya memihak pada kelompok pro-pemekaran. Sesuai data yang ada, para anggota DPRD yang turut mendukung pemekaran merasa diteror, rumahnya dirusak dan dilempari, oleh demonstran yang teridentifikasi berasal dari organisasi kepemudaan tertentu; terlihat dari baju seragam yang dikenakannya.

Kampanye pemekaran, walupun mendapat rintangan, akan tetapi pemrakarsanya terus memperkuat 'tenaga' dari massa pendukung, dengan menciptakan wacana (diskursus) berkenaan dengan sejarah, di mana berdasarkan sejarah tersebut Batubara memang berbeda dari Asahan dan berdiri sendiri secara otonom. Tidak berada di bawah Asahan, melainkan sama-sama dalam level afdeling. Sejarah ini terus diperkuat seakan-akan tidak ada lagi kekeliruan di dalamnya, dan kebenaran yang ada di dalamnya pun harus didukung atau diwujudkan kembali apabila orang Batubara ingin memperbaiki keadaannya menjadi lebih baik dari kondisi sekarang. Ini berarti gagasan mendirikan Kabupaten Batubara tidak boleh tidak, harus diwujudkan saat itu juga. Kesejahteraan orang Batubara akan datang bersamaan dengan terwujudnya Kabupaten pemekaran yang otonom, yaitu Kabupaten Batubara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, John, **Mission to East Coast Sumatera: A Report** (London: Blackwood, 1823).
- Anonimus, **Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah** (Medan: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara 1994)
- Anonymous, **Pengkajian Teknis Masyarakat Batubara Terhadap Kesiapan Terbentuknya Kabupaten Batubara di Wilayah Batubara**, draft, tidak diterbitkan (Medan: 2001).
- Derks, Ton & Nico Roymans, "Introduction", dalam Ton Derks & Nico Roymans, editor, **Ethnic Constructs in Antiquity: The Role of Power and Tradition** (Amsterdam: Amsterdam University Press 2009), hal.: 1- 36
- Fauzan, Uzair., "Parmalim dan Politik Negara Setengah Hati", dalam Heru Prasetia & Ingwuri Handayani (editor), **Agama dan Kebudayaan: Pergulatan di Tengah Komunitas** (Depok: Yayasan Desantara 2010) hal.: 47-62.
- Geertz, Clifford, "The Integrative Revolution: Primordial Loyalties and Civil Politics in the New States", dalam **Old Societies and New States**, Clifford Geertz, ed., New York: Free Press, 163, hal. 105-157.
- Geertz, Clifford., **The Interpretation of Culture** (New York: Basic Books, Inc., Publishers 1973)
- Grillo, Eric., "Two Dogmas of Discourse Analysis", dalam Eric Grillo (ed) **Power Without Domination, Dialogism and The Empowering Property of Communication** (Philadelphia, PA, USA: John Benjamins Publishing Company 2005) hal. 3-41
.....
<http://site.ebrary.com/lib/indonesiau/Doc?id=10075859&ppq=21>
- Gultom, Ibrahim., **Agama Malim** (Jakarta: Bumi Aksara 2010),
- Hadiz, Vedi R., **Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia** (Stanford, California: Stanford University Press 2010)

- Hamka (1984:85) **Islam dan Adat Minangkabau** (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas 1984),
- Hefner, Robert W., **Civil Islam: Muslims and Democratizations in Indonesia** (USA: Princeton University Press, 2000)
- Isaacs, Harold R., **Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan Perubahan Politik** (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1993).
- Iskandar, Harry Effendi., Zaiyardam Zubir & Zulqoyim, **Inyo Ajo Awak Juo: Solidaritas Primitif, Uang, dan Kekuasaan dalam Pemilihan Bupati Padang Pariaman 2005** (Padang: Minangkabau Press 2010).
- Jacqueline Vel (2007), "*Campaigning for a New District in West Sumba*", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, ed, **Renegotiating Boundaries Local Politic in Post-Soeharto Indonesia** (Leiden: KITLV Press 2007), hal., 104-119.
- Jijiao, Zhang., Migration, The Emergence Of Multi-Ethnic Cities And Ethnic Relations In China, dalam Giuliana B. Prato, eds, **Beyond Multiculturalism Views From Anthropology** (England: Ashgate Publishing Limited 2009), hal.: 173 – 188.
- Koentjaraningrat, **Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional** (Jakarta: UI Pres 1993).
- Marzali, Amri., **Antropologi dan Pembangunan Indonesia** (Jakarta: Prenada Indonesia 2005).
- Myrna Eindhoven (2007) "New colonizers? Identity, representation and government in the post-New Order Mentawai Archipelago", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, **RENEGOTIATING BOUNDARIES Local politics in post-Soeharto Indonesia** (Leiden: KITLV 2007).
- Nash, June., "Introduction: Social Movements and Global Processes", dalam June Nash (ed), **Social Movements an Anthropological Reader** (USA, UK, Australia : Blackwell Publishing 2005) hal. 1-26.
- Pelly, Usman, **Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing** (Jakarta: LP3ES, 1994).

- Perret, Daniel., **Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut** (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia 2010).
- Purba, O.H.S & Elvis F. Purba, **Migran Batak Toba di Luar Tapanuli Utara: Suatu Deskripsi** (Medan: Monora 1998).
- Purba, O.H.S & Elvis F. Purba., **Migrasi Spontan Batak toba (Marserak): Sebab, Motip dan Akibat Perpindahan Penduduk dari Dataran Tinggi Toba** (Medan: Monora 1997).
- R. Soetrisman, **Legenda Kisaran Naga** (Yogyakarta: Araska, tt)
- Reid, Anthony., **Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera** (Jakarta: Sinar Harapan1987).
- Simorangkir, Abdul Kadir., **Gejolak Batubara: Studi Antropologi Tentang Konflik Pembentukan Kabupaten Batubara**, Tesis, tidak diterbitkan (Medan: Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan 2009).
- Suprayitno, **Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia** (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia 2001).
- Tambiah, Stanley J. *The Politics of Ethnicity* , dalam Robert Borofsky,ed, **Assessing Cultural Anthropology** (Newyork: McGraw-Hill,Inc 1994) hal.: 430-442.
- Vel, Jacqueline.,*"Campaigning for a New District in West Sumba"*, dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, ed, **Renegotiating Boundaries Local Politic in Post-Soeharto Indonesia** (Leiden: KITLV Press 2007), hal., 104-119.
- Walshaw, Margaret., **Working With Foucault in Education** (Rotterdam, Taipei: Sense Publishers 2007).
- Zuska, Fikarwin & Agustrisno, **Membangun Pembelajaran Secara Antropologis Tentang Politik Etnisitas Dalam Pemekaran Daerah di Sumatera Utara**, Laporan Hasil Penelitian Hibah Strategis Nasional Tahun 2010 (Medan: Universitas Sumatera Utara 2010)

Zuska, Fikarwin., **Relasi Kuasa Antar Pelaku Dalam Kehidupan Sehari-hari : Kasus Pengelolaan Sampah Kota** (Medan: FISIP USU Press 2008)

Internet

Basyarsyah II, Tunku Luckman Sinar (2009a), **Kerajaan-Kerajaan Melayu Tua**, terdapat dalam : <http://massahar-tiga.blogspot.com/2009/10/kerajaan-kerajaan-melayu-tua.html>

BasyarsyahII, Tunku Luckman Sinar (2009b), **Lahirnya Kerajaan Di Sumatera Timur**, terdapat dalam: <http://massahar-tiga.blogspot.com/2009/10/Lahirnya-kerajaan-di-sumatera-timur.html>